

**PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Komparatif Di Gampong Padang Kleng Dan Gampong Paya Baro
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**



Disusun Oleh :

**OKTA LISTIA
NIM. 170802092**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OKTA LISTIA
NIM : 170802092
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Padang Kleng, 26 Oktober 1999
Alamat : Gp. Padang Kleng, Kec. Teunom,
Kab. Aceh Jaya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

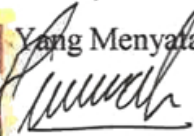
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2022



Yang Menyatakan

OKTA LISTIA
NIM. 170802092

**PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Komparatif Di Gampong Padang Kleng Dan Gampong Paya Baro
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

OKTA LISTIA
NIM: 170802092

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk munaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307323000032002

Cut Zamharira., S.IP., M.AP
NIDN.2017127403

**PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi Komparatif Di Gampong Padang Kleng Dan Gampong Paya Baro
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Januari 2022 M
13 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP. 197307323000032002

Sekretaris,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP

NIDN. 2017127403

Penguji I,



Dr. Nurkhalis, SE., S.Ag., M.Ag

NIP. 197303262005011003

Penguji II,



Muazzinah, B.Sc., M.PA.

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP. 197307232000032002

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Kemudian juga dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 ayat 18 Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan. BUMG adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah gampong yaitu Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peran pemerintah gampong sangat penting dalam memulai unit usaha yang akan dibentuk melalui musyawarah gampong untuk memajukan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat gampong. Dalam pengelolaan BUMG pemerintah gampong sangat berperan dalam pembentukan unit-unit usaha yang akan dijalankan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Peneliti mendeskripsikan peran pemerintahan gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Padang Kleng berperan dalam pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri, hanya pemerintah gampong kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMG. Sedangkan pemerintah Gampong Paya Baro berperan dalam pengelolaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong, hanya saja pemerintah gampong kurang mengawasi usaha BUMG sehingga salah satu usaha kurang berjalan dan pemerintah gampong juga kurang transparan kepada masyarakat mengenai BUMG dan membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah gampong.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Gampong, Pengelolaan, BUMG*

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tiada henti-hentinya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Basuki dan Ibunda Asmawati yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga yaitu Mak Nih, adik Fatimah Amel Dila, dan adik Adil Fardyan serta saudara-saudara lainnya yang selalu mendoakan penulis agar cepat selesai dalam

penulisan skripsi Akhirnya inilah persembahan yang dapat saya berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti saya.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin , AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nurzalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, dan Cut Zamharira, S. IP., M.AP., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediannya.
8. Kepada sahabat terbaik penulis, Swag Partners (Aura, Mela, Sukma, Rika, Zihan, Nurul, Nopus, Devi, Nefa, Reza, Zulfa, Hafizam, Nusrat, Furqan) dan Lumutan_Squad (Diana, Firly, Hanifah, Linda, Nadia, Putri, Navisa, Rifka, Sella). Dan juga sahabat seperjuangan penulis dari SD, Sakdea, Felia, Anita.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Penulis,

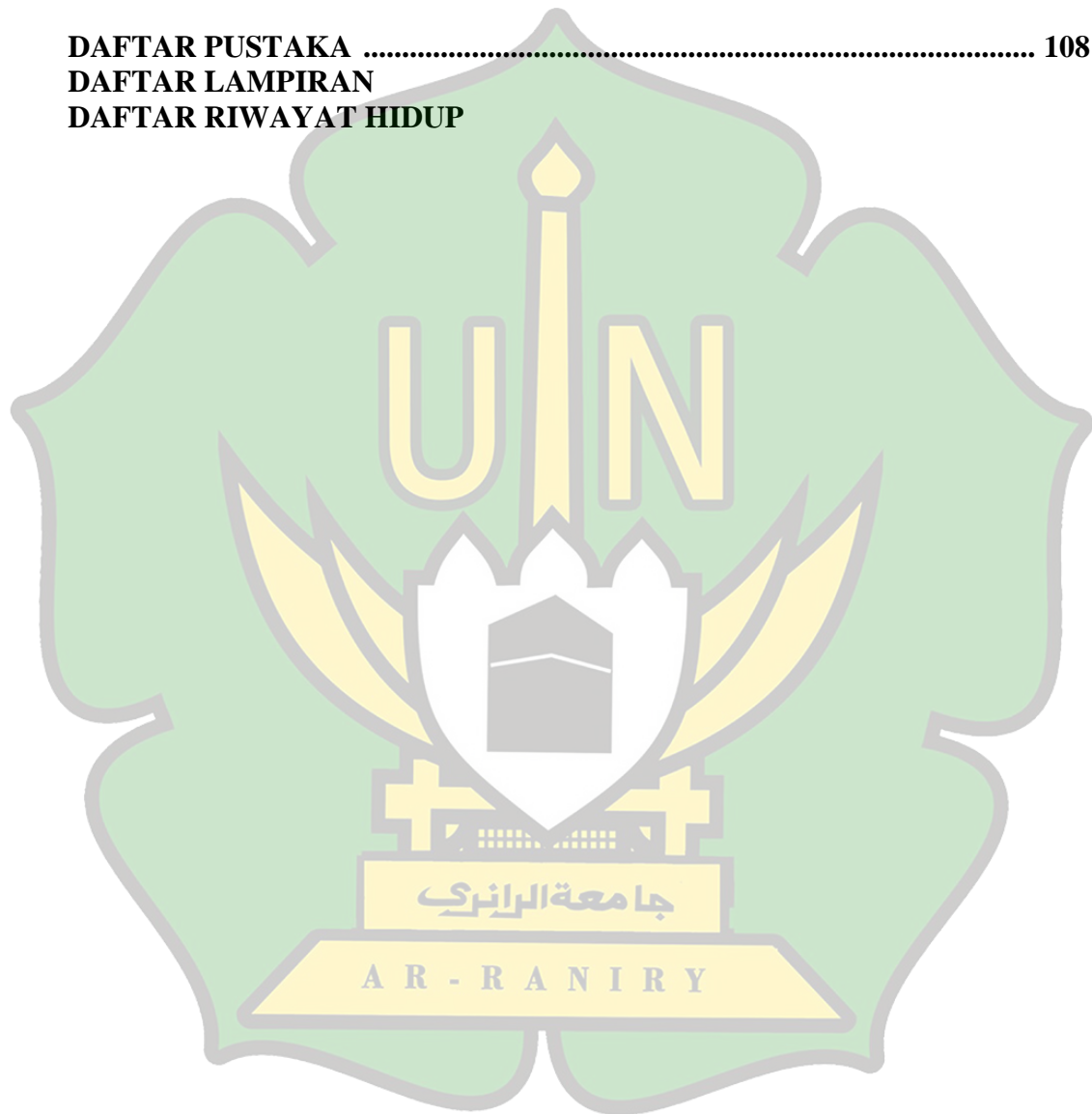
Okta Listia

NIM. 170802092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Konsep Peran	17
2.3 Pengertian Pengelolaan	19
2.4 Definisi Gampong	24
2.5 Pemerintahan Gampong	25
2.6 Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)	25
2.7 Kerangka Berpikir	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro	29
3.2 Gambaran Umum Gampong Padang Kleng	29
3.3 Gambaran Umum BUMG Padang Kleng	41
3.4 Gambaran Umum Gampong Paya Baro.....	44
3.5 Gambaran Umum BUMG Paya Baro.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peran Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan BUMG	61
4.1.1 Perencanaan	66
4.2.1 Pelaksanaan	72
4.3.1 Pembinaan dan Pengawasan	85
4.2 Kendala dalam Pengelolaan BUMG	91
4.3 Studi Komparatif Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan	

BUMG	94
4.4 Sistem Pengelolaan Keuangan BUMG	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	10
Tabel 1.2 Jumlah Informan	11
Tabel 3.1 Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Padang Kleng	33
Tabel 3.2 Potensi Sumber Daya Alam Gampong Padang Kleng	34
Tabel 3.3 Potensi Sumber Daya Manusia Gampong Padang Kleng	35
Tabel 3.4 Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Paya Baro	48
Tabel 3.5 Potensi Sumber Daya Alam Gampong Paya Baro	49
Tabel 3.6 Potensi Sumber Daya Manusia Gampong Paya Baro	50
Tabel 4.1 Perbandingan Gampong padang Kleng dan Gampong Paya Baro	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir	28
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Gampong Padang Kleng	39
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Padang Kleng	40
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi BUMG Bina Sejahtera Mandiri	42
Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Gampong Paya Baro	54
Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Tuha Peut	65
Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi BUMG Usaha Pemakmu Gampong	67
Gambar 4.1 Laporan Keuangan Gampong Padang Kleng	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	111
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	114
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian	115
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian Di Gampong Padang Kleng dan Paya Baro	116
Lampiran 5 Dokumen Penelitian	118
Lampiran 6 Riwayat Hidup	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pengembangan ekonomi di desa sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam penyediaan fasilitas yang mendukung perekonomian yang ada desa. Di provinsi Aceh desa lebih banyak dikenal dengan gampong. Penyebutan nama gampong merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh, gampong memiliki pengaturan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Pada dasarnya desa/gampong merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan negara. Gampong berada di bawah mukim yang dipimpin oleh keuchik dimana mereka berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dengan Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau nama lain gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹

Pemerintahan gampong adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dan mengatur wilayah pemerintahan yang terendah dalam proses

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan kehidupan yang ada di masyarakat, kedudukan gampong dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting.² Oleh karenanya pemerintah gampong mempunyai peran yang penting dalam mengatur dan mengurus tata kelola pemerintahannya serta mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun gampong untuk lebih maju terutama dari aspek perekonomian yang ada di gampong.

Kemajuan gampong sangat ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pembangunan gampong memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan membantu perekonomian masyarakat serta menghindari penanggulangan kemiskinan yang ada di gampong terutama pendapatan ekonomi masyarakat. Gampong yang mandiri memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat, walaupun gampong menerima bantuan dari pemerintah pusat.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan potensi gampong dengan membangun lembaga gampong yang bertugas sebagai fasilitator, oleh karena itu pemerintah gampong perlu menggali potensi di lingkungan gampong serta melihat sumber daya dan memperoleh pendapatan gampong selain dari pemerintah pusat. Maka pemerintah gampong perlu untuk mendirikan usaha yang dapat membantu

² Zuhrizal Fadhly, Ramayana, *Peran Pemerintah Gampong dalam Mengoptimalkan Program Posyandu*, Jurnal Public Policy UTU, Vol.4, No.2, Oktober 2018, hal 207

³ Dasmi Husin, Hilmi,dkk, *Pendampingan Manajerial Pengelolaan BUMG Sepakat Jaya di Blang Mangat Kota Lhokseumawe*, Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe, Vol 4 No. 1 April 2020

perekonomian masyarakat dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat, usaha yang didirikan itu BUMDES atau BUMG Badan Usaha Milik Gampong

BUMG adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴ Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 ayat 18 “Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong”.⁵

Pembentukan BUMG dapat menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi yang ada di masyarakat, karena BUMG memiliki unit usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk bisa berwirausaha dan juga mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah gampong juga melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberi motivasi dan mempersiapkan masyarakat untuk bisa lebih mandiri dengan pendirian BUMG. Selanjutnya BUMG didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang kemudian menjadi usaha bagi masyarakat untuk lebih mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007). Hal. 3

⁵ Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Sejauh ini di Aceh BUMG yang dijalankan di tiap-tiap gampong terdapat 318 BUMG yang sudah terdaftar di BUMDES.id dan merupakan jumlah BUMDes terbaik secara nasional.⁶ Hanya saja ada beberapa gampong di Aceh BUMGnya masih belum berjalan dengan maksimal dan juga yang berjalan dengan semestinya. BUMG adalah lembaga yang membantu perkembangan ekonomi yang ada di gampong kedepannya dan menampung kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan gampong tersebut. Kemajuan ekonomi sebuah gampong tercapai karena adanya peran pemerintah gampong serta keikutsertaan masyarakat Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.

Gampong Padang Kleng merupakan sebuah desa yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki banyak sektor usaha ekonomi seperti usaha jual beli sembako/kelontong, usaha ternak ayam, pertukangan, usaha lahan pertanian dan lain-lain, pada umumnya mata pencaharian penduduk Gampong Padang Kleng sebagai petani/pekebun. Gampong Padang Kleng sudah memiliki BUMG dan sudah berjalan selama 8 tahun sesuai dengan Qanun Gampong Padang Kleng Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMG yang diberi nama “Bina Sejahtera Mandiri Group”. Adapun program-program usaha milik gampong tersebut berupa air RO yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum, kemudian tersedianya sewa-menyewa sarana dan prasarana yang sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat Gampong Padang Kleng. BUMG Padang Kleng sudah berjalan dengan semestinya hanya saja terdapat usaha sewa menyewa tratak dan sound system

⁶ <https://dpmg.acehprov.go.id>

selama pandemic ini berkurang. Oleh karena itu sangat diperlukan peran pemerintah Gampong Padang Kleng dalam membina dan mengawasi pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri Group.

Berdasarkan temuan peneliti ketika melakukan observasi awal di Gampong Padang Kleng, terdapat salah satu unit usaha Bina Sejahtera Mandiri yang pendapatannya menurun akibat pandemic COVID-19. Oleh karena itu sangat diperlukan keterlibatan pemerintah gampong dalam dalam pengelolaanS BUMG di Gampong Padang Kleng.

Gampong Paya Baro merupakan sebuah gampong yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki banyak sektor usaha ekonomi seperti usaha jual beli sembako/kelontong, usaha ternak ayam, pertukangan, usaha lahan pertanian dan lain-lain, pada umumnya mata pencaharian penduduk. Gampong Paya Baro sudah memiliki BUMG dan diberi nama “Usaha Pemakmu Gampong (UPGAM). Adapun program usaha milik BUMG Paya Baro yaitu terdapat simpan pinjam dimana masyarakat bisa meminjam modal kepada BUMG, tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang sangat membantu para petani, serta terdapat usaha peternakan dan perkebunan yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli masyarakat.

Berdasarkan temuan peneliti ketika melakukan observasi awal di Gampong Paya Baro terdapat unit usaha BUMG yang kurang berjalan, pemerintah gampong baru berkeinginan tambah modal untuk usaha BUMG tahun 2020, namun modal untuk BUMG tidak ada lagi. Oleh karena itu sangat diperlukan peran pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG Paya Baro.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi komparatif antara Gampong Padang Kleng dengan Gampong Paya Baro. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah Gampong dalam Pengelolaan BUMG di kedua gampong tersebut serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMG. Dari uraian diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana peran pemerintahan gampong dalam pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan mengangkat judul penelitian *“Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat bagaimana peran pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.
2. Melihat apa saja kendala dalam pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro?

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami peran pemerintah gampong terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.
2. Untuk memahami apa saja kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemerintah yang ada di desa dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan khususnya peran pemerintah melalui badan BUMG.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi kepada lembaga BUMG serta masyarakat umum. Dan menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis peran pemerintah terhadap pelaksanaan BUMG.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi komparatif adalah suatu riset yang bersifat membandingkan satu variabel atau lebih dan mendapatkan pemahaman mengenai proses sebab-akibat yang terlibat dalam suatu peristiwa.
2. Peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap suatu perubahan atau harapan terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
3. Pemerintah gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang dikepalai oleh Keuchik serta dibantu oleh perangkat yang lain untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat gampong.
4. Pengelolaan adalah suatu ilmu manajemen yang dimana pengelolaan diartikan suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi meliputi semua kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan bersama.
5. BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah yang sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan langsung guna mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat desa.

6. Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial menurut suatu sistem adat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁷

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya⁸

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat, manfaat lainnya adalah guna peneliti untuk tidak terjebak dalam banyaknya data yang di dapat di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih difokuskan pada informasi yang baru yang akan diperoleh dari perekonomian dan sosial, yang dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan mana data yang tidak relevan.

⁷ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007). Hal 67.

⁸ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006). Hal 4.

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator Pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri dan Usaha Pemakmu Gampong

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peran Pemerintahan gampong dalam pengelolaan BUMG	a. Pembinaan dan pengawasan b. Perencanaan c. Pelaksanaan	-Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa -Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

Sumber: Data diolah tahun 2021

1.7.3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

1.7.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang relevansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang diperoleh dari informan adalah Keuchik, Sekretaris, Kaur Keuangan, Ketua BUMG, Bendahara BUMG dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data langsung yang sudah diperoleh oleh pihak primer atau informan baik dari dokumen maupun observasi langsung dari lapangan. Adapun data sekunder dapat diperoleh melalui media massa, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi.

1.7.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yang di dapat langsung melalui wawancara dari narasumber.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa/Keuchik (Keuchik Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)	2 Orang
2.	Sekretaris Desa (Sekretaris Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)	2 Orang
3.	Kaur Keuangan (Kaur Keuangan Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)	2 Orang
4.	Ketua BUMG (Ketua BUMG Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)	2 Orang
5.	Anggota BUMG (Anggota BUMG Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)	2 Orang

6.	Masyarakat (Masyarakat Gampong Padang Kleng dan masyarakat Gampong Paya Baro)	6 Orang
Jumlah		16 Orang

Sumber: Data diolah Tahun (2021)

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, atau pengamatan dan pencacatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, penijauan dan penyelidikan riset.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana peran pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG. Adapun setiap kegiatan yang terdapat di gampong tidak terlepas dari peranan pemerintah gampong yang memiliki fungsi sebagai pengawas setiap kegiatan yang ada di gampong.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya

⁹ W Gulo, *Metode Penelitian. Cet. Ke-7*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007). Hal 116

langsung dengan responden.¹⁰ Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*).¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data langsung atau informasi dari beberapa orang yang menjadi sampel dengan melakukan pewarta dan narasumber yang dianggap mengetahui tentang objek penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro, pengurus BUMG, dan masyarakat Gampong Padang Kleng dan masyarakat Gampong Paya Baro.

3. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tulis, dokumen, surat kabar, foto-foto, dan sebagainya yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹² Tentu dengan adanya dokumen semakin mendukung sumber data lain. Metode dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan data primer dan sekunder terkait pengelolaan BUMG.

¹⁰ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-19, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008). Hal 192.

¹¹ Harbani Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal 107

¹² Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta :Selemba Humanika, 2010 hlm. 143.

1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, persamaan dan perbedaan² atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.¹³



¹³Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal 45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu tersebut penulis mendapatkan banyak teori yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut merupakan penelitian terkait dengan penelitian yang akan ditulis.

Fifianti, (2018), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”*. Penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Fifianti untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa di Desa Patani. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani. Karena Peran pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes kurang optimal. Pengelolaannya kurang efektif dalam mengembangkan dana yang ada, padahal Desa Patani mempunyai potensi yang

bisa dikembangkan dana yang ada, padahal Desa Patani mempunyai potensi yang bisa dikembangkan.¹⁴

Rumaini, (2019), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa yang dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jajema Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Peneliti ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Bagun Jejama cukup Berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari/jenis usaha trading.¹⁵

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, (2016). Jurnal ini berjudul *“Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”*. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian membuktikan

¹⁴ Fifianti, (2018), *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹⁵ Rumaini, (2019), *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

bahwa peran Pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPRGAR).¹⁶

Dina Asmatul Asna, (2019), Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, dengan judul *“Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Komparatif di Desa Kedung Suren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat Peran Aparat Pemerintah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur dalam mengelola dan melaksanakan dana desa untuk mewujudkan good governance dan hasilnya dibandingkan antara kedua desa tersebut manakah yang sudah sepenuhnya melaksanakan dan memenuhi prinsip diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pemerintah Desa Sidomakmur menunjukkan bahwa Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur berperan dalam pelaksanaan dana desa di pemerintah Desa serta mengupayakan pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintah desa. Untuk pemerintahan Desa Kedungsuren, aparat pemerintah desa sudah berperan terhadap pelaksanaan dana desa, hanya saja secara teknis masih terdapat kendala, kendala tersebut berupa kurangnya inisiatif

¹⁶ Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari *“Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”*.(2016) , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol.5 No. 2

dari aparat pemerintahan desa untuk saling bekerjasama dalam hal perencanaan dan pelaporan, khususnya di Desa Kedungsuren.¹⁷

Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul penelitian penulis. Walaupun secara garis besar atau bahkan teorinya dapat menjadi acuan untuk menjadi kerangka pikir. Namun akan jelas berbeda. Baik fokus penelitian dan lokasi penelitian.

2.2. Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.¹⁸ Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang sudah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia sudah menjalankan suatu peran. Namun lebih jeli menyebutkan bahwa perbedaan antara peran dan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan

¹⁷ Dina Asmatul Asna, (2019), *“Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Komparatif di Desa Kedung Suren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal”*. Skripsi, Universitas Walisongo Semarang

¹⁸ <http://kbbi.web.id>

¹⁹ Dewi Wulan Sari, *“Sosiologi Konsep dan Teori*. (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hal 106

ilmu pengetahuan, yang keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁰

Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran yaitu:

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
6. Adil tidaknya beban kerja volume kerja yang harus dikerjakan
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.²¹

Dari penjelasan di atas peran adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dalam menjalankan sebuah tanggung jawab berdasarkan kedudukan atau posisi yang dimilikinya untuk merencanakan, mengarahkan dan menggerakkan sehingga menghasilkan suatu perubahan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk membangun sebuah desa untuk

²⁰ Soekanto, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa Sosiologi* . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hal 212-213

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*’, (Rajawali Pers, Jakarta 2006). Hal 212-213

lebih maju serta melihat potensi apa saja yang ada di desa untuk dikembangkan serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

2.3. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan dapat diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga disebut sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu agar terasa lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*tomanage*) dan merujuk pada suatu proses dalam mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.²²

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.²³ Pengelolaan tidak akan terlepas dari organisasi dan instansi pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, untuk memulai kegiatan diperlukan langkah-langkah manajemen yang fungsional yaitu, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dapat dengan mudah dicapai.

Menurut Balderton dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektifitas material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Moekijat dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa pengelolaan

²² J. Setiadi, Nugroho, SE., MM, “Perilaku konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemarkaran”, (Jakarta: 2003).

²³ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan dalam organisasi yang sudah tersusun dengan rapi untuk diawasi dan diurus dengan baik agar mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.1. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:²⁵

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektifitas.

²⁴ Rhardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal 113

²⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Hal 34

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:²⁶

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan
9. Mengadakan penilaian
10. Mengadakan review secara berkala
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.3.2. Fungsi Pengelolaan

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.²⁷

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pemberian perintah), *Coordinating* (pengorganisasian), *Controlling* (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planing* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).

²⁶ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008). Hal 59

²⁷ Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003). Hal 98-100

Terdapat fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, organizing, actuating, dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.²⁸ Maka dapat dikumpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang disusun sesuai dengan rencana mengenai tindakan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan yang telah diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk mencapai unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.²⁹ Maka dapat dimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan proses pengelompokan orang-orang dalam

²⁸

Siagian Sondang, *Fungsi-fungsi manajemen*, (Jakarta: bumi aksara, 2012). Hal 36

²⁹

Djati Juliatriasa, dan John Soeprihanto, *manajemen umum sebuah pengantardan masalah* (Yogyakarta: BPFF, 1998). Hal 14

suatu kegiatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk digerakkan dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci implementasinya biasanya dilakukan ketika perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brwone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³⁰

4. Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar terlaksana tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek-praktek fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif

³⁰ Usman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Edisi keempat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hal 70

³¹ Syaiful, Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Rosdakarya. 2011)

dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

2.4. Definisi Gampong/Desa

Menurut Kamus Besar Indonesia (2013) Desa/Gampong adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kewenangan lokal yang berskala lokal, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dijelaskan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipilih oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.³²

³²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Pasal 6 Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2.5. Pemerintahan Gampong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seorang kepala desa menjabat selama enam (6) tahun untuk satu (1) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga (3) kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.³³

Dalam Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 menyebutkan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan pemerintahan gampong. Pemerintah gampong adalah sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

2.6. Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

2.6.1. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Di Provinsi Aceh BUMDes dikenal dengan sebutan BUMG yaitu Badan Usaha Milik Gampong. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 18 “Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat

³³

Undang-undang Nomor 6 Tahun 214 tentang Desa

BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.³⁴

BUMG adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat gampong. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan potensi gampong guna menunjang potensi gampong.³⁵ BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong³⁶

BUMG merupakan suatu lembaga ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari gampong, usaha ini dibangun untuk gampong lebih mandiri dalam membangun perekonomian gampong serta membantu jalannya proses perekonomian yang ada di masyarakat.

2.6.2. Tujuan dan Fungsi BUMG

Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu:

1. Mendorong perkembangan perekonomian
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat gampong yang berpenghasilan rendah

³⁴ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri*, (Bogor:IPB Press,2002). Hal. 15

³⁶ Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2016). Hal. 1

4. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informasi BUMG didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong yang merupakan prakarsa masyarakat gampong. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat masyarakat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat gampong³⁷

Pendirian dan pengelolaan BUMG merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif gampong yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel, dan sustainbel. Karena itu dibutuhkan usaha yang dapat menjadikan pengelolaan BUMG tersebut berjalan secara profesional, efektif, efisien dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong.³⁸

BUMG merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi di gampong, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, perikanan, dan agrobisnis, serta industri dan kajian masyarakat. Adapun fungsi dari keberadaan BUMG:

- a. Pembentukan usaha baru yang berasal dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat gampong yang telah ada.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
- c. Usaha peningkatan kesempatan dalam rangka memperkuat otonomi gampong dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah gampong dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

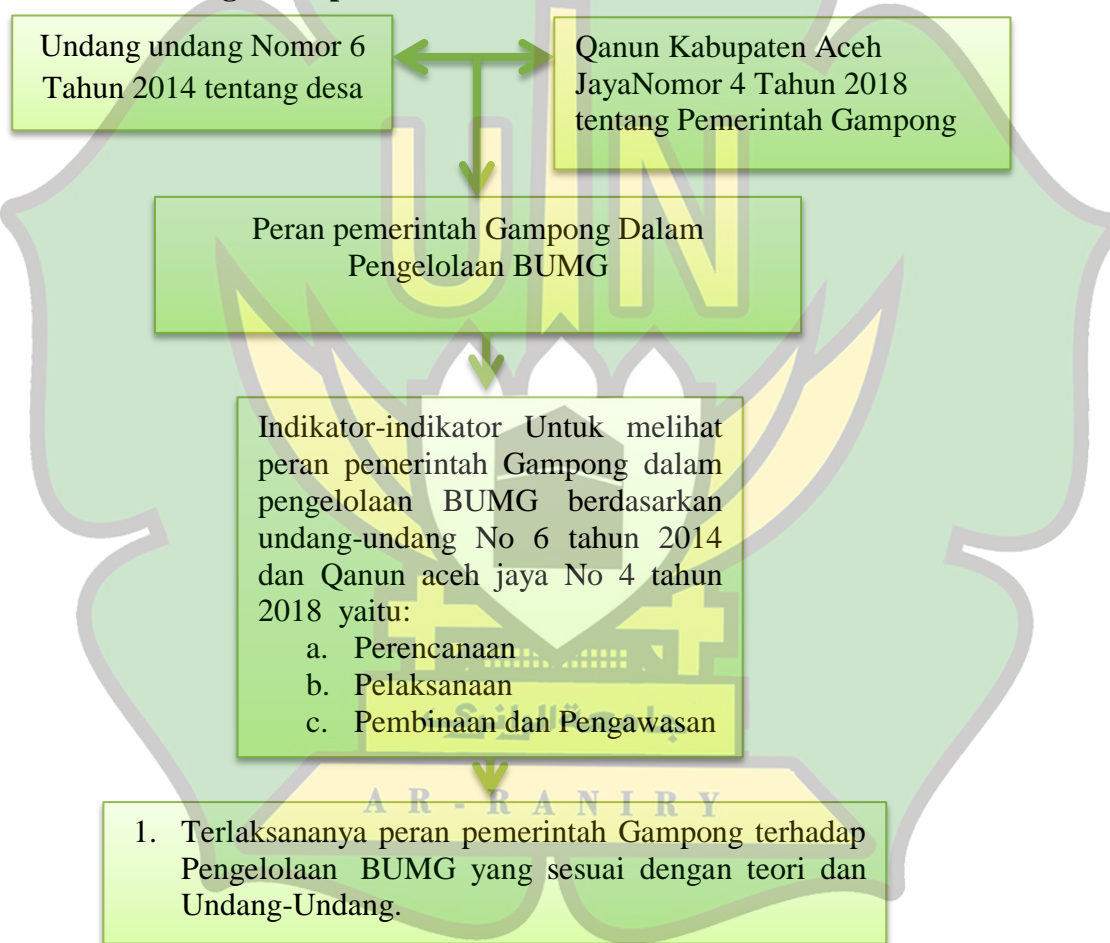
³⁷ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007). Hal 5.

³⁸ *Ibid.* Hal 5

- e. Memberikan pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat gampong.³⁹

Dari penjelasan diatas BUMG merupakan suatu badan usaha yang dapat memotivasi masyarakat untuk perkembangan gampong, serta mendukung pelaksanaan pembangunan dalam proses peningkatan roda perekonomian masyarakat

2.7. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Badan Kerangka Berpikir

³⁹

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007). Hal 12

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro

Penelitian ini berlokasi di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, bertempat di kantor Desa Padang Kleng dan Desa Paya Baro membahas tentang Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), penelitian ini berlangsung kurang lebih hampir 3 bulan Oktober sampai Desember 2021. Alasan memilih lokasi tersebut yakni untuk mengembangkan unit-unit usaha yang ada di kedua gampong tersebut melalui peran pemerintahan gampong serta melihat bagaimana studi komparatif usaha BUMG di kedua gampong tersebut.

3.2 Gambaran Umum Gampong Padang Kleng

3.2.1 Sejarah Gampong Padang Kleng

Asal Mulanya terjadi gampong Padang Kleng yaitu ada suatu hamparan tanah yang hamparannya hitam diatas tanah tersebut tidak tumbuh satu tumbuh tumbuhan yang hidup.tanah hamparan lazim disebut dalam bahasa aceh, Padang dan warna hitam pekat dalam bahasa aceh disebut Kleng jadi dari perpaduan kata tersebut sehingga disebutlah PADANG KLENG. Keuchik Pertama di Desa Padang Kleng adalah Sdr. Ibrahim, sebelum menjadi keuchik Sdr. Ibrahim dulu menjabat sebagai ketua Wilayah di desa Padang Kleng sekarang

3. 2.2 Demografis

Gampong Padang Kleng termasuk dalam wilayah kemungkinan Keude Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan luas wilayah ± 1.200

Ha, yang memiliki:

a. Kondisi Geografis

1. Banyak curah hujan : -
2. Ketinggian tanah dari permukaan laut : ± 3 Meter
3. Suhu udara rata-rata : Sedang
4. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Daerah rendah

b. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Gampong Padang Kleng)

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 0.5 km
2. Jarak dari ibu kota Kabupaten/Kota : 41 km
3. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 195 km
4. Jarak dari Puskesmas : 4 km
5. Jarak dari rumah sakit umum : 41 km
6. Jarak dari SPBU : 4 km

c. Batas Wilayah Gampong Padang Kleng

1. Gampong Tanoh Mayang di sebelah Utara
2. Gampong Tanoh Anoe di sebelah Timur
3. Gampong Alue Ambang sebelah Barat
4. Gampong Pantan sebelah Selatan

3. 2.3 Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

A. Jumlah Kepala Keluarga	533	KK
B. Jumlah laki-laki	797	Orang
1. 0 - 12 bulan	12	Orang
2. > 1 - < 5 tahun	47	Orang
3. ≥ 5 - < 7 tahun	99	Orang
4. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	170	Orang
5. > 15 - 56 tahun	299	Orang
6. > 56 tahun	72	Orang
C. Jumlah perempuan	790	Orang
1. 0 - 12 bulan	4	Orang
2. > 1 - < 5 tahun	54	Orang
3. ≥ 5 - < 7 tahun	116	Orang
4. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	188	Orang
5. > 15 - 56 tahun	300	Orang
6. > 56 tahun	80	Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

1. Jumlah penduduk	1587	Orang
2. Jumlah laki-laki	797	Orang
3. Jumlah perempuan	790	Orang
4. Jumlah janda	104	Orang
5. Jumlah duda	82	Orang
6. Jumlah anak yatim	12	Orang
7. Jumlah fakir miskin	165	Orang
8. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	358	Orang
9. > 15 - 56 tahun	599	Orang

10. > 56 tahun	172	Orang
----------------	-----	-------

Sumber : Profil Gampong Padang Kleng

Sebelum konflik tatanan kehidupan masyarakat Gampong Padang Kleng kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegaitan-kegaitan yang berbau kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi dengan baik, dan pasca konflik kondisi ini perlahan-perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum konflik.

Masyarakat pada umumnya juga sangat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong pekerjaan jalan, membersihkan masjid, dan bersifat silaturahmi seperti hajatan, khanduri takhzhiah dan lain-lain. Dalam kegiatan keagamaan seperti, mengadakan wirit yasin dan pengajian yang dilakukan setiap hari jum'at, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pesta perkawinan, mengadakan MTQ tingkat gampong, masyarakat gampong saling tolong menolong dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

3. 2.4 Keadaan Ekonomi

Masyarakat Padang Kleng memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya: jual beli sembako/kelontong, usaha ternak ayam, pertukangan, usaha lahan perkebunan, pertanian dan lain-lain.

Gampong Padang Kleng adalah salah satu gampong diantara gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang terletak

di sebelah timur pusat Pemerintahan Kecamatan. Mata pencaharian penduduk Gampong Padang Kleng pada umumnya adalah petani/pekebun.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif (ganda), hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan gampong yang cukup baik serta berfungsi struktur pemerintahan gampong itu sendiri. Berikut ini dilampirkan jenis *Kegiatan Sosial Masyarakat* dalam kehidupan sehari-hari:

Tabel 3.1
Kegiatan Sosial Masyarakat

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Kondisi Usaha
1	2	3	4
1. Petani :			
• Petani Pangan	300	19,8	Aktif
• Petani Perkebunan	60	4,0	Aktif
2. Peternak	50	3,3	Aktif
3. Pegawai Negeri	132	8,7	Aktif
4. Tukang	36	2,4	Aktif
5. Pedagang	60	4,0	Aktif
6. Tidak Ada pekerjaan tetap	273	18,0	Aktif

Sumber : Profil Gampong Padang Kleng

3. 2.5 Potensi dan Masalah

1. Potensi

Potensi adalah ketersediaannya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di gampong tersebut untuk proses pengembangan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Dengan dukungan luas gampong yang mencapai ±557 hektar dengan beberapa kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel potensi gampong berikut ini:

Tabel 3.2
Potensi Sumber Daya Alam

Jenis	Luas/Unit	Keterangan
Area Pusat Gampong	2 Ha	Aktif
Area Pemukiman	298 Ha	Aktif
Area Pertanian / Sawah	198 Ha	Aktif
Area Perkebunan	453 Ha	Aktif
Area pendidikan	3 Ha	Berfungsi
Area Pusat Pelayanan Kesehatan	1 Ha	Aktif
Area Rekreasi dan Olah Raga	6 Ha	Aktif
Rawa-rawa	239 Ha	Belum Berfungsi
Jalan Lorong	4000 m	Tanah
Gorong-gorong	20 Unit	Perlu Penambahan

Sumber: Profil Gampong Padang Kleng

b. Potensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia Gampong Padang Kleng pada dasarnya jika dilihat dari segi pendidikan terutama tingkat pendidikan terakhir sangatlah rendah. Untuk tingkat dasar dan menengah ada sedikit peningkatan dalam minat belajar. Ini dapat kita lihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya di luar daerah.

Potensi aparatur gampong di Padang Kleng pada saat ini berjalan dengan baik, minat kerja masyarakat Gampong Padang Kleng sangatlah tinggi, menurut ketrampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Walaupun tidak banyak yang memiliki keterampilan yang khusus, namun mereka terus berusaha apa yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk potensi sumber daya manusia masyarakat Padang Kleng dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3
Potensi Sumber Daya Manusia

1.	Jumlah penduduk buta huruf	50	Orang
2.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	75	Orang
3.	Jumlah penduduk tamat SD/MIN	300	Orang
4.	Jumlah penduduk tamat SLTP/MTsN	320	Orang
5.	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	500	Orang
6.	Jumlah penduduk tamat D-1	-	Orang
7.	Jumlah penduduk tamat D-2	-	Orang
8.	Jumlah penduduk tamat D-3	30	Orang
9.	Jumlah penduduk tamat S-1	150	Orang
10.	Jumlah penduduk tamat S-2	2	Orang

Sumber : Profil Gampong Padang Kleng

2. Masalah

Sesuai hasil pada Forum Musrenbang dalam upaya menggagas masa depan Gampong untuk 6 (enam) tahun kedepan, dapat diidentifikasi 5 (lima) issue/permasalahan gampong yang *di rangking* berdasarkan jumlah masukan yang terbanyak peserta musyawarah, tingkat kemampuan gampong yang didasarkan atas kondisi, eksistensi serta dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Kelima permasalahan tersebut dikelompokkan ke bidang-bidang sebagai berikut :

1. Sektor Infrastruktur (sarana dan prasarana)
2. Sosial Budaya
3. SDM dan Ekonomi
4. Kesehatan
5. Pendidikan.

3. 2.6 Kondisi Pemerintahan Gampong Padang Kleng

a. Pembagian Wilayah Gampong Padang Kleng

Gampong Padang Kleng terletak di daerah tepi sungai dan dengan posisi gampong yang terletak di dalam kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan serta persawahan yang menjadi salah satu sumber daya tarik tersendiri dengan wilayah lain, adapun pembagian wilayah di gampong tersebut dipecah menjadi 4 dusun diantaranya adalah:

1. Dusun Pemuda
2. Dusun Bahagia
3. Dusun Sentosa

4. Dusun Makmur

b. Visi dan Misi Gampong Padang Kleng

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. Visi Gampong Padang Kleng disesuaikan dengan visi keuchik terpilih dengan berbagai kajian kebutuhan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan cita-cita gampong demi kemajuan, mandiri dan bermartabat.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Visi Gampong Padang Kleng adalah : **Visi Gampong Padang Kleng adalah “Terwujudnya tata pemerintahan gampong yang baik guna terciptanya gampong Padang Kleng yang transparan, akuntabilitas, maju, mandiri dan bermartabat dengan berlandaskan Syariat Islam “**

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu yang harus dilaksanakan oleh gampong agar terciptanya visi gampong tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan, misi Gampong Padang Kleng adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan gampong yang berasaskan kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, kearifan lokal, partisipatif dan responsif.

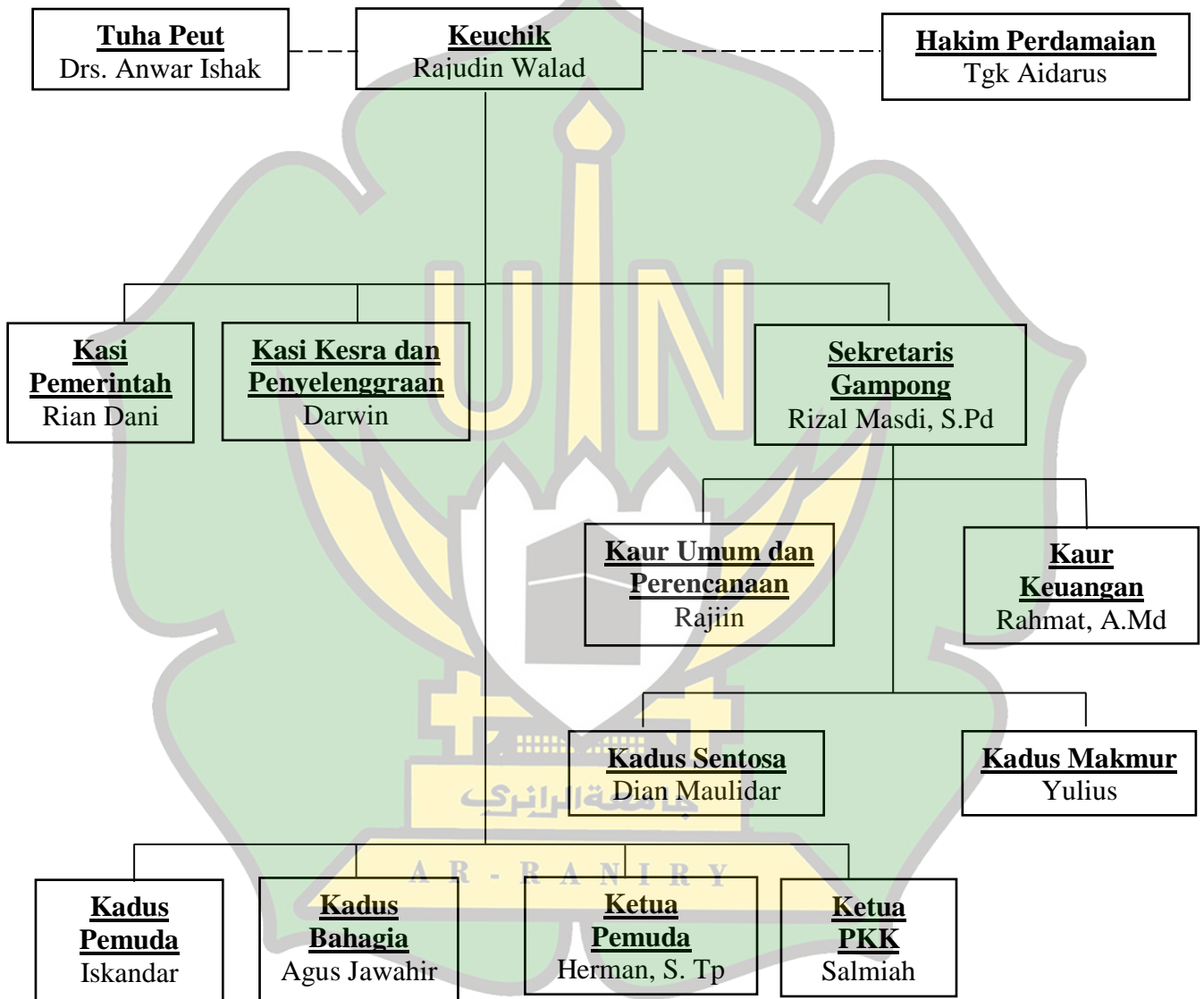
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional.
3. Membangun sarana dan prasarana gampong yang berbasis pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian desa melalui pengoptimalan fungsi badan usaha milik gampong (BUMG).
5. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kemampuan daya saing serta pemanfaatan potensi gampong.
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan di gampong.
7. Menciptakan kondisi lingkungan yang agamis dan berbudaya yang ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana peribadatan dan sumber daya.



3. 2.8 Struktur Pemerintahan Gampong Padang Kleng

1. Pemerintahan Gampong

**Struktur Pemerintahan
Gampong Padang Kleng 2020-2025
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya**



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Gampong Padang Kleng

Sumber: RPJM Gampong Padang Kleng Tahun 2020-2025

3. 2.9 Struktur Tuha Peut

2. Struktur Tuha Peut



Gambar 3.2 Bagan Struktur Tuha Peut Gampong Padang Kleng

Sumber: RPJM Gampong Padang Kleng 2020-2025

3.3 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Padang Kleng

Badan usaha milik gampong merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu usaha BUMG juga memberikan sumbangan bagi pendapatan asli gampong yang memungkinkan gampong mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik sendiri yang disebut BUMG. Pembentukan BUMG Gampong Padang Kleng berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Jaya. BUM Gampong Padang Kleng didirikan pada tanggal 11 Juni 2014 untuk waktu yang tidak terbatas, lembaga ini bernama “BINA SEJAHTERA MANDIRI”.

3.2.1 Visi dan Misi BUMG “Bina Sejahtera Mandiri” Gampong Padang Kleng

Visi BUM Gampong Bina Sejahtera Mandiri adalah Meningkatkan Pendapatan Modal Gampong. Misi BUM Gampong Bina Sejahtera Mandiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menggali potensi gampong untuk didayagunakan, dan membuka pola wirausaha masyarakat.

3. 2.2 Struktur Organisasi BUMG “Bina Sejahtera Mandiri” Gampong Padang Kleng



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pengurus BUMG Padang Kleng

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Berikut ini usaha yang di kelolam oleh BUMG Bina Sejahtera Mandiri:

a. Ie Jep/Air Isi Ulang

Usaha depot air minum isi ulang di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom sudah ada pada tahun 2016. Usaha ini mempunyai 350 galon per galon harga satuannya Rp. 4000., dan mulai beroperasi mulai dari pagi sampai sore dan usaha ini dikelola oleh satu orang karyawan. Unit usaha ini dapat memproduksi air isi ulang seminggu 2 kali untuk dijual ke kios-kios atau ke toko, namun apabila ada yang pesanan air isi ulang bisa langsung diantar ke rumah. Untuk pendapatan air isi ulang dalam sebulan dapat Rp. 900.000., Air isi ulang merupakan salah satu usaha milik gampong yang membantu perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

b. Mobil Desa

Mobil desa merupakan salah satu alat transportasi milik desa yang dananya berasal dari desa, mobil desa sudah ada sejak tahun 2018. Usaha mobil desa ini terkadang digunakan untuk mengantar dan mengambil air minum isi ulang yang hasilnya dibagi dua dan dimasukkan ke kas BUMG. Mobil desa ini sering digunakan untuk mengantar teratak dan sound system ketika ada acara pesta, namun apabila ada masyarakat gampong yang ingin menyewa/rental mobil dapat disewakan, misalnya ada masyarakat gampong yang punya usaha dekor, untuk harga penyewaan biasanya Rp. 150.000-200.000., rupiah tergantung sejauh mana pengantarannya. Dengan adanya mobil desa ini sangat membantu masyarakat gampong dalam berpergian jauh seperti kelompok ibu-ibu yasinan, ratib seribu yang dapat undangan dari Kecamatan.

c. Tenda/tratak dan Sound System

Unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2017, dan dikelola oleh satu orang karyawan, usaha ini mempunyai 4 tratak terdiri dari 2 tratak biasa dan 2 tratak kerucut untuk harga sewa tratak bersihnya masuk ke kas BUMG Rp 150.000, tratak biasanya disewakan untuk acara tasyakuran, pernikahan, dan acara lain, namun apabila ada masyarakat Gampong Padang Kleng yang kena musibah meninggal untuk teratak tidak disewakan.

Sound system juga merupakan salah satu usaha milik Gampong Padang Kleng, usaha ini sering disewakan untuk acara pernikahan berbarengan dengan tratak untuk dalam gampong sekali sewa sound system Rp. 500.000., sedangkan untuk luar gampong harga sewanya Rp 600.000.,

d. Gedung Serba Guna

Gedung serba guna adalah salah satu usaha milik gampong bisanya gedung ini digunakan ketika ada acara pelatihan, gedung ini sudah sejak lama namun baru beroperasi tahun 2020, untuk harga sewa gedung Rp 250.000 untuk sekali pemakaian.

3.4 Gambaran Umum Gampong Paya Baro

3.2.1 Sejarah Gampong Paya Baro

Gampong Paya Baro pada mulanya adalah berupa hutan belantara yang dimana banyak orang yang berkebun, pada saat itu ada seorang yang bernama petuah Abah bekerja di kebun menanam lada, tatkala Petuah Abah ketika mencangkul kebun mendapatkan areal wilayah kebunnya dipenuhi batu di dalam tanah, maka dari situlah Petuah Abah memberikan nama daerah tersebut dengan

nama Paya Baro, pada tahun 1927 Petuah Abah itu sendiri yang memimpin Gampong Paya Baro, demikianlah sekilas tentang berdirinya Gampong Paya Baro.

3. 2.2 Demografis

Gampong Paya Baro termasuk wilayah kemungkiman Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan luas wilayah ± 1500 Ha, yang memiliki:

a. Kondisi Geografis

- | | |
|---|------------------|
| 1. Banyak curah hujan | : - |
| 2. Ketinggian tanah dari permukaan laut | : ± 5 Meter |
| 3. Suhu udara rata-rata | : Sedang |
| 4. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : Dataran rendah |

b. Orbritrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Gampong Paya Baro)

- | | |
|--|----------|
| 1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 03 km |
| 2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten/Kota | : 39 km |
| 3. Jarak Ibu Kota Provinsi | : 194 km |
| 4. Jarak dari Puskesmas | : 10 km |
| 5. Jarak dari Rumah Sakit Umum | : 40 km |
| 6. Jarak dari SPBU | : 11 km |

c. Batas wilayah Gampong Paya Baro

1. Gampong Teupin Asan sebelah Timur
2. Gampong Cot Trap di sebelah Selatan
3. Gampong Baro sebelah Utara

4. Samudera Hindia sebelah Barat

3. 2.3 Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

A. Jumlah Kepala Keluarga	363	KK
B. Jumlah laki-laki	503	Orang
7. 0 - 12 bulan	10	Orang
8. > 1 - < 5 tahun	12	Orang
9. ≥ 5 - < 7 tahun	94	Orang
10. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	145	Orang
11. > 15 - 56 tahun	164	Orang
12. > 56 tahun	78	Orang
C. Jumlah perempuan	495	Orang
7. 0 - 12 bulan	18	Orang
8. > 1 - < 5 tahun	32	Orang
9. ≥ 5 - < 7 tahun	54	Orang
10. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	70	Orang
11. > 15 - 56 tahun	239	Orang
12. > 56 tahun	82	Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

11. Jumlah penduduk	998	Orang
12. Jumlah laki-laki	503	Orang
13. Jumlah perempuan	495	Orang
14. Jumlah janda	67	Orang
15. Jumlah duda	7	Orang
16. Jumlah anak yatim	10	Orang
17. Jumlah fakir miskin	54	orang
18. ≥ 7 - ≤ 15 tahun	215	orang

19.	> 15 – 56 tahun	403	orang
20.	> 56 tahun	160	orang

Sumber : Profil Gampong Paya Baro

Sebelum konflik tatanan kehidupan masyarakat Gampong Paya Baro sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi dengan baik, dan pasca konflik kondisi perlahan-lahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum konflik.

Masyarakat pada umumnya juga sangat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong pekerjaan jalan, membersihkan masjid, dan yang bersifat silaturahmi seperti hajtan, khanduri takhzhiah, dan lain-lain. Dan kegiatan keagamaan seperti, mengasdakan wirit yasin, dan pengajian yang dilakukan setiap hari jum'at, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' m'raj. Pesta perkawinan, mengadakan MTQ tingkat gampong, masyarakat gampong saling tolong-menolong dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. 2.4 Keadaan Ekonomi

Masyarakat Paya Baro memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya: usaha jual beli sembako/kelontong, usaha ternak ayam, pertukangan, usaha lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Gampong Paya Baro adalah salah satu gampong diantara gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di

sebelah timur pusat pemerintahan Kecamatan. Mata pencaharian penduduk Gampong Paya Baro pada umumnya sebagai petani/wiraswasta dan juga sebagai PNS.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin sangat baik, juga menjadi kekuatan Gampong Paya Baro dalam pengelolaan pemerintah dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintah gampong yang cukup baik serta berfungsinya struktur pemerintahan gampong itu sendiri. Berikut dilampirkan jenis *Kegiatan Sosial Masyarakat* dalam kehidupan sehari-hari:

Tabel. 3.7
Kegiatan Sosial Masyarakat.

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Kondisi Usaha
1	2	3	4
1. Petani :			
-Petani Pangan	412	65,18	Aktif
-Petani Perkebunan	124	19,62	Aktif
2. Peternak	27	4,27	Aktif
3. Pegawai Negeri	28	3,95	Aktif
4. Tukang	15	2,37	Aktif
5. Pedagang	22	3,48	Aktif
6. Sopir	7	1,10	Aktif

Sumber : Profil Gampong Paya Baro

3. 2.5 Potensi dan Masalah

1. Potensi

Potensi adalah ketersediaannya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di gampong tersebut untuk proses pengembangan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Dengan dukungan luas gampong yang mencapai ±950 hektar dengan beberapa kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel potensi gampong berikut:

Tabel. 3.9
Potensi Sumber Daya Alam

Jenis	Luas/Unit	Keterangan
Area Pusat Gampong	7 Ha	Aktif
Area Pemukiman	620,3 Ha	Aktif
Area Pertanian / Sawah	525,1 Ha	Aktif
Area Perkebunan	293,5 Ha	Aktif
Area pendidikan	4,6 Ha	Berfungsi
Area Pusat Pelayanan Kesehatan	10 X 20 m	Mulai diaktifkan
Area Rekreasi dan Olah Raga	3,5 Ha	Aktif
Rawa-rawa	45 Ha	Belum Berfungsi
Jalan Lorong	10 Ha	Tanah
Jalan Setapak	2700 m	Rabat Beton
Gorong-gorong	8 Unit	Perlu Penambahan

Sumber: Profil Gampong Paya Baro

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Gampong Paya Baro pada dasarnya jika dilihat dari segi pendidikan terutama tingkat pendidikan terakhir sangatlah rendah. Untuk tingkat dasar dan menengah ada sedikit peningkatan dalam minat belajar. Ini dapat kita lihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya di luar daerah. Potensi aparatur gampong di Paya Baro pada saat ini berjalan dengan baik, minat kerja masyarakat Gampong Paya Baro sangatlah tinggi, menurut keterampilan dan keahlian dibidangnya masing-masing. Walaupun tidak banyak yang memiliki keterampilan yang khusus, namun mereka terus berusaha apa yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk potensi sumber daya manusia masyarakat Paya Baro dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10
Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Potensi Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	Jumlah penduduk buta huruf	93 orang
2.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	237 orang
3.	Jumlah penduduk tamat SD/MIN	115 orang
4.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ MTsN	223 orang
5.	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	180 orang
6.	Jumlah penduduk tamat D-1	03 orang
7.	Jumlah penduduk tamat D-2	25 orang
8.	Jumlah penduduk tamat D-3	06 orang
9.	Jumlah penduduk tamat S-1	20 orang

Sumber : Profil Gampong Paya Baro

2. Masalah

Sesuai hasil Forum Musrembang dalam upaya menggagas masa depan gampong untuk 6 (enam) tahun kedepan, dapat diidentifikasi 5 (lima) issue/permasalahan gampong yang *di rangking* berdasarkan jumlah masukan yang terbanyak peserta musyawarah, tingkat kemampuan gampong yang didasarkan atas kondisi, eksistensi serta dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Kelima permasalahan tersebut dikelompokkan ke bidang-bidang sebagai berikut:

1. Sektor Infrastruktur (sarana dan prasarana)
2. Sosial Budaya
3. Ekonomi
4. Kesehatan
5. Pendidikan

3. 2.6 Kondisi Pemerintahan Gampong Paya Baro

a. Pembagian Wilayah Gampong Paya Baro

Gampong Paya Baro terletak di daerah tepi sungai dan dengan posisi gampong yang terletak didalam kawasan perkebunan serta persawahan yang menjadi salah satu sumber daya tarik tersendiri dengan wilayah lain, adapun pembagian wilayah gampong tersebut dipecah menjadi 3 dusun, diantaranya adalah:

1. Dusu Teupin Asan
2. Dusun Paya Baro
3. Dusun Cot Trieng

b. Visi dan Misi Gampong Paya Baro

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. Penyusunan visi Gampong Paya Baro dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di gampong seperti Pemerintah Gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat gampong dan masyarakat gampong pada umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Visi Gampong Paya Baro: **“Mewujudkan Gampong Paya Baro Menuju Gampong Swasembada Pangan Sentra Produksi Kopra”**

2. Misi

Visi berada di atas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan gampong, sebagaimana proses yang telah dilakukan maka misi Gampong Paya Baro adalah:

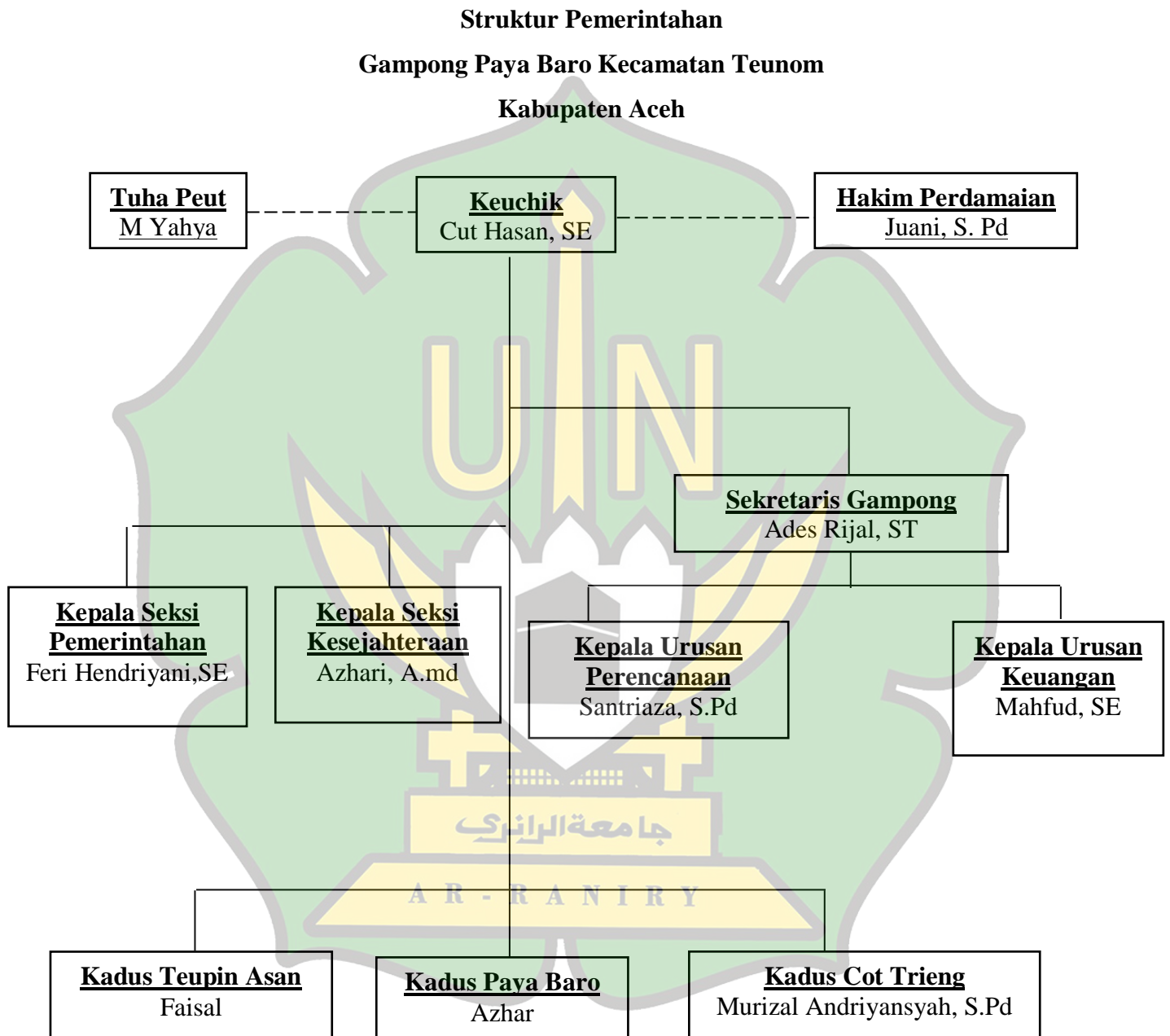
1. Membangun dan menyediakan sarana penunjang untuk peningkatan produksi di bidang pertanian yaitu: pembukaan jalan baru kesawah, membangun jembatan, prakarsa/pengaspalan jalan ke sawah yang lama, pembukaan lahan baru, pengadaan bibit padi, pengadaan obat-obat hama dan yang terpenting adalah pengairan irigasi.

2. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dibidang perkebunan dengan pembukaan lahan baru, pengadaan bibit sawit dan karet serta penyuluhan pertanian dan pengadaan obat-obat hama.
3. Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama penambahan modal untuk kelompok untuk kelompok SPP.
4. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan
5. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong
6. Membangun Lembaga Keuangan Mikro di gampong



3.4.7. Struktur Pemerintahan Gampong

1. Pemerintahan Gampong

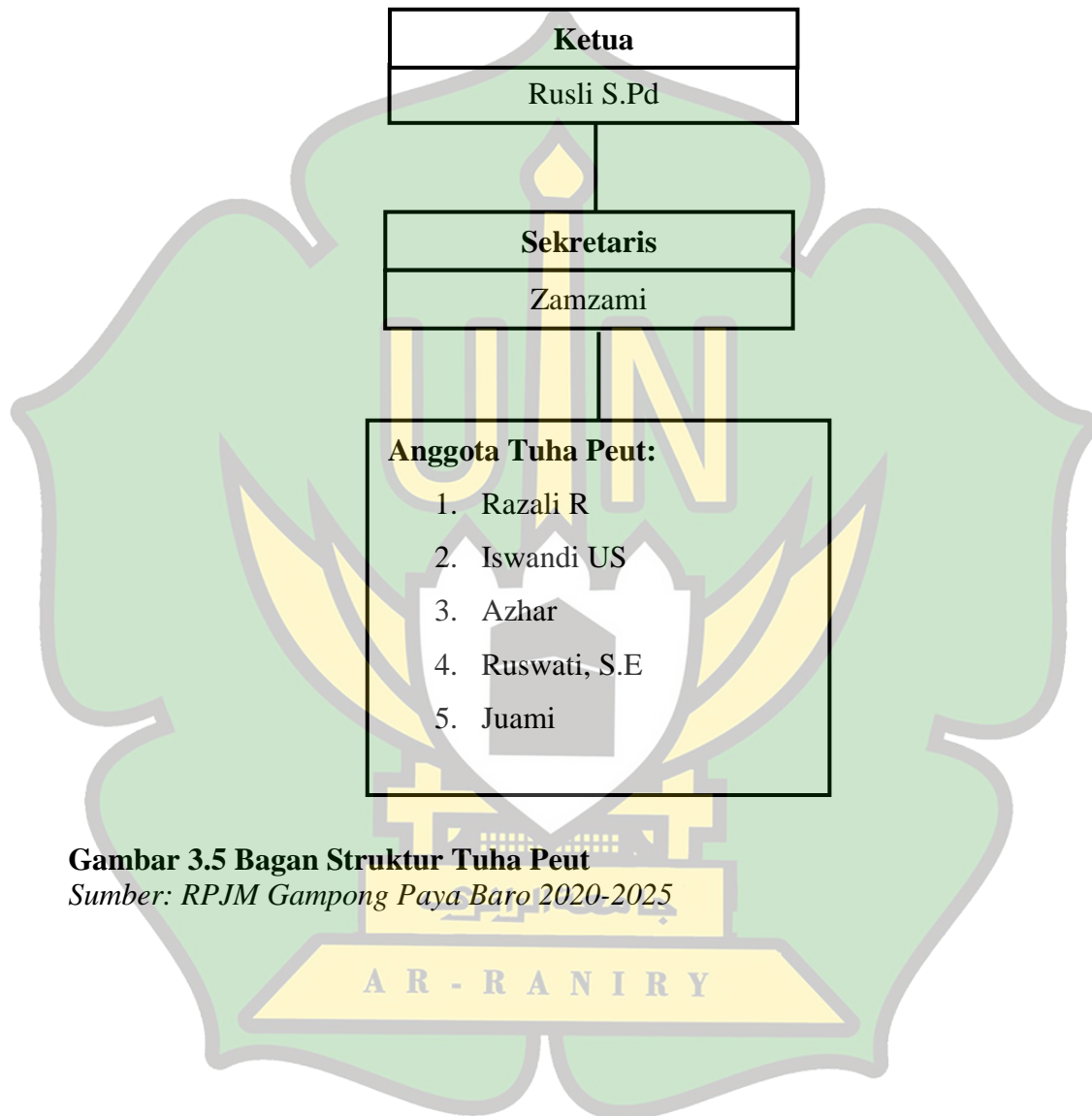


Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Paya Baro

Sumber: RPJM Gampong Paya Baro Tahun 2020-2025

3.4.8. Struktur Tuha Peut

**Struktur Tuha Peut
Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom
Kabupaten Aceh Jaya**



Gambar 3.5 Bagan Struktur Tuha Peut

Sumber: RPJM Gampong Paya Baro 2020-2025

3.4.9. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Paya Baro

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan usaha milik gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian gampong untuk lebih berkembang berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Pembentukan BUMG Gampong Paya Baro berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat dan penasehat gampong Paya Baro membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada tanggal 10 September 2015, yang diberi nama “Usaha Peumakmu Gampong (UPGAM)” dibentuknya BUMG dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki gampong dapat dikembangkan sumberdaya lokal sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.



3. 2.7 Struktur Organisasi BUMG “Usaha Pemakmu Gampong” Gampong Paya Baro



Gambar 3.6 Struktur Tuha Peut

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berikut jenis usaha yang dikelola oleh unit usaha Gampong Paya Baro:

a. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Unit usaha simpan pinjam perempuan merupakan salah satu usaha yang membantu masyarakat dari segi perekonomian, usaha SPP berdiri sejak tahun 2010 pada tanggal 25 september usaha ini sudah ada sebelum berdirinya BUMG Paya Baro. Pada tahun 2016 usaha SPP menjadi salah satu unit usaha yang bergabung dalam BUMG Paya Baro. Usaha SPP ini sangat membantu masyarakat Gampong Paya Baro seperti petani, pedagang, dan lain-lain. Untuk proses pengembalian simpan pinjam perempuan ini di beri bunga 10%, dengan adanya usaha simpan pinjam perempuan sangat membantu dari segi perekonomian.

b. Peternakan

Usaha peternakan sapi sudah berjalan 4 tahun sejak 2017, Untuk pembelian pertama jumlah sapi ada 6 ekor sampai tahun 2021 jumlah sapi sudah bertambah sebanyak 7 ekor sapi. Usaha ini dikelola oleh BUMG dipelihara oleh masyarakat Gampong Paya Baro, sistem pengelolaan peternakan sapi dikenal dengan sistem mawah, misalnya satu ekor sapi dikelola oleh masyarakat yang kurang mampu, kemudian sapi tersebut punya anak 2 ekor sapi kemudian dibagi dua hasilnya untuk BUMG 1 ekor sapi dan untuk yang pelihara 1 ekor sapi. Proses pemawah/pelihara sapi ini secara bergilir untuk membantu masyarakat lain. Kemudian pihak BUMG memberikan anak sapi kepada masyarakat kurang mampu yang untuk dipelihara/dipemawah. Unit

usaha peternakan sapi ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Baro

c. Perkebunan

1. Kebun Kelapa Dalam

Unit usaha ini merupakan usaha milik Gampong Paya Baro sudah ada sejak tahun 2018, dengan luas tanah 500 meter dan dana yang dikeluarkan untuk usaha kebun kelapa dalam sebesar Rp, 40.000.000. Usaha kelapa dalam di kelola oleh pihak BUMG Paya Baro, proses panennya kelapa dalam 3 bulan sekali dengan hasil Rp, 500.000 sekali panen dengan jumlah 10 pohon kelapa.

2. Kebun Kelapa Sawit

Kebun kelapa sawit ini merupakan salah satu usaha milik Gampong Paya Baro baru di mulai tahun 2021, pemerintah Gampong Paya Baro melihat banyaknya peluang di usaha kebun kelapa sawit ini dan dapat membantu masyarakat gampong dari segi kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Gampong Paya Baro membeli kebun sawit dengan anggaran yang dikeluarkan untuk usaha ini sebesar Rp 80.000.000. Kelapa sawit ini dalam sebulan 2 kali atau 15 hari sekali. Untuk sekali petik buah sawit dapat Rp 1.500.000 itu tergantung berapa harga sawitnya.

d. Pertanian

Usaha di bidang pertanian ada mesin perontok dan mesin hand traktor, Unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2016 dan dikelola oleh pengurus BUMG Paya Baro untuk mesin perontok ada 3 buah dan mesin hand traktor. Masyarakat Gampong Paya Baro sebagian besar berprofesi sebagai petani sawah, dengan adanya usaha ini sangat membantu masyarakat dalam bertani, dan masyarakat lebih mudah dalam mengelola sawah mereka. Penggunaan dari mesin perontok dan hand traktor pada saat masyarakat turun ke sawah, untuk mesin perontok digunakan ketika petani panen padi yaitu dalam satu tahun 2 kali, proses penyewaan mesin perontok 5 % untuk BUMG. Sedangkan mesin hand traktor untuk sekali sewa sebulan Rp 500.000, penggunaan mesin hand traktor sama halnya dengan mesin perontok, namun jika ada yang menyewa untuk hal lain seperti petani kacang dan jagung dapat disewakan.



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Paya Baro. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan juga sesuai dengan rumusan masalah maka secara sederhana hasil dan pembahasan dari peneliti dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya, maka menunjukkan bahwa seseorang sudah melaksanakan suatu peran.⁴⁰ Peran dapat dikatan juga sebagai suatu perilaku yang ditimbulkan dari kepribadian seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial pada saat menjalankan suatu tugas atau kewajiban yang dimilikinya bagaimana peran tersebut harus dijalankan.

BUMG merupakan suatu usaha yang memiliki peran strategis untuk perkembangan gampong dan meningkatkan pendapatan asli gampong serta mendorong perekonomian masyarakat. Pemerintah gampong memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola BUMG yaitu mendirikan dan ikut serta dalam

⁴⁰ Soekanto, *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa Sosiologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hal 212-213

membina dan mengawasi penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan BUMG untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat gampong. Di Kecamatan Teunom hampir setiap gampong sudah memiliki BUMG seperti Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.

BUMG Padang Kleng sudah berjalan selama 8 tahun berdasarkan hasil musyawarah pemerintah gampong, tuha peut, serta kesepakatan masyarakat didukung dengan lahirnya Qanun Gampong Padang Kleng Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMG dengan nama “Bina Sejahtera Mandiri”. Terkait penetapan BUMG ini peneliti telah mewawancarai Keuchik Gampong Padang Kleng Rajudin Walad yang menyatakan bahwa:

*“...BUMG ini sudah ada sejak tahun 2014, dan sudah memiliki satu unit usaha yaitu usaha simpan pinjam perempuan, namun seiring berjalannya waktu usaha ini berjalan lambat karena faktor-faktor tertentu dan kini usaha tersebut sudah lama berhenti”.*⁴¹

Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris gampong ketika proses pembentukan BUMG:

*“Jadi waktu itu ada musyawarah gampong untuk mengisi kekosongan dan juga diwajibkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang pedoman umum Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Gampong. Jadi proses pembentukan BUMG dilakukan secara musyawarah bersama aparatur gampong, tuha peut, tokoh masyarakat serta masyarakat yang ikut hadir”.*⁴²

⁴¹ Wawancara dengan keuchik Gampong Padang Kleng, Rajudin Walad pada tanggal 6 Desember 2021

⁴² Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd pada tanggal 6 Desember 2021

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BUMG ketika proses pembentukan BUMG Padang Kleng:

“...Untuk proses pembentukan BUMG saya tidak tahu bagaimana prosesnya karena saya lanjutan dari pengurus sebelumnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembentukannya bisa langsung jumpai pengurus sebelumnya, tapi yang saya tahu sekilas mengenai proses pembentukan BUMG Padang Kleng itu melalui musyawarah bersama aparat gampong dan juga sudah dikeluarkan aturan pemerintah mengenai pembentukan BUMG berdasarkan Undang-undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014 dan juga sesuai aturan Bupati Aceh Jaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Bantuan Modal Badan Usaha Milik Gampong. Pembentukan BUMG itu sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli gampong serta mampu menjadi gampong yang lebih mandiri.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pembentukan BUMG Padang Kleng ini dilakukan secara musyawarah besar dan disitu terdiri dari pemerintah gampong, Tuha Peut, Tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat yang ikut serta dalam proses pembentukan BUMG Bina Sejahtera Mandiri. Namun berdasarkan pernyataan masyarakat mengenai pembentukan BUMG sebagai berikut:

“untuk proses pembentukan BUMG, saya kurang tahu mengenai hal tersebut karena saya tidak ikut rapat dan setahu saya untuk pembentukan BUMG itu rapatnya cuma aparat gampong dan saya kurang paham.”⁴⁴

Dari hasil uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat gampong Padang kleng masih belum paham mengenai BUMG, dan dari sebagian masyarakat ada yg belum tahu mengenai usaha BUMG. Mereka berpikir bahwa BUMG itu merupakan bantuan yang bebentuk uang.

⁴³ Wawancara dengan Ketua Bumg Gampong Padang Kleng, Pria Dani, S.Kom, MM

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng Sawiyah, pada tanggal 5 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi di lapangan, pemerintah Gampong Padang Kleng mempunyai peran dalam proses pembentukan unit usaha yang akan dikelola oleh masyarakat Gampong Padang Kleng dan aparat gampong. Namun hanya saja ketika peneliti melakukan wawancara informan masyarakat, mereka kurang memahami mengenai pengelolaan BUMG seharusnya mereka harus memahami mengenai BUMG karena mereka ikut terlibat dalam pengelolaan BUMG untuk kedepan. Kemudian pemerintah gampong juga harus memperhatikan lagi keadaan sosial yang ada di masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUMG, karena sebagian masyarakat gampong ada yang belum tahu dan memahami mengenai BUMG.

Sementara itu di Gampong Paya Baro pelaksanaan BUMG sudah berjalan selama 7 tahun sejak tahun 2015 berdasarkan hasil musyawarah pemerintah gampong, Tuha Peut, serta kesepakatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli gampong dan membantu perekonomian masyarakat, jadi pemerintah Gampong Paya Baro mendirikan BUMG dengan nama “Usaha Peumakmu Gampong (UPGAM)”. Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 31 Tahun 2014 tentang pedoman umum Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Gampong. Oleh karena itu pemerintah Gampong Paya Baro mendirikan unit usaha ini untuk membantu perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan, SE :

“...Mulai pembentukan BUMG di Gampong Paya Baro itu pada tahun 2015 itu sudah ada dan Gampong Paya Baro sudah memiliki satu unit usaha

*yaitu usaha simpan pinjam perempuan (SPP), unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2010 dan dikelola oleh masyarakat gampong, kemudian usaha ini dilanjutkan menjadi bagian dari BUMG. Namun usaha ini tidak berjalan semestinya karena ada dua dusun pengelola usaha SPP tidak mau mengelola lagi, sebab sebagian dari masyarakat tidak membayar sehingga usaha SPP tidak berjalan dan hanya dikelola dua dusun saja”.*⁴⁵

Kemudian disampaikan juga oleh sekretaris gampong mengenai proses

pembentukan BUMG Paya Baro:

*“Mengenai proses pembentukannya itu..dulu ada BUMG baru saya jadi Sekdes dan adanya BUMG ini setau saya yang pertama ada anjuran dari pemerintah dari dana desa, kemudian Keuchik membentuk rapat, dan diundang dari pihak pendamping desa”.*⁴⁶

Hal tersebut juga dijelaskan oleh masyarakat gampong mengenai pembentukan BUMG yaitu sebagai berikut:

*“untuk pembentukan BUMG di gampong kita itu dilakukan ketika rapat kalo tidak salah saya dan dihadiri oleh aparat gampong, tuha peut dan sebagian dari masyarakat disitu kita lakukan musyawarah bersama untuk pembentukan BUMG”.*⁴⁷

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses BUMG di Gampong Paya Baro dibentuk pada tahun 2015 dilakukan secara musyawarah, bersama pendamping desa, tokoh masyarakat serta kesepakatan masyarakat dalam pembentukan BUMG.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi di lapangan, pemerintah Gampong Paya Baro mempunyai peran yang sangat besar dalam pendirian Usaha Peumakmu Gampong (UPGAM). Selain itu peneliti juga

⁴⁵ Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan, SE, pada tanggal 1 Desember 2021

⁴⁶ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, ST, pada tanggal 2 Desember 2021

⁴⁷ Wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Baro, Murizal Andriansyah, pada tanggal 5 Januari 2022

menemukan hal yang berbeda, yaitu BUMG Paya Baro sudah ada sejak tahun 2015. Namun saat peneliti melakukan observasi di lapangan peneliti menemukan pernyataan yang berbeda dengan Qanun Gampong Paya Baro dimana keuchik Gampong Paya Baro mengatakan bahwa BUMG ini berdiri pada tahun 2015 dan hanya simpan pinjam, tapi tidak berjalan dengan lancar sehingga dari 4 dusun hanya ada dua dusun masih berjalan dengan baik program simpan pinjam hingga saat ini. Sedangkan dalam Qanun Gampong Paya Baro Nomor 028. Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Gampong Paya Baro Tahun Anggaran 2017 dijelaskan bahwa BUMG dibentuk pada tahun 2017 hal ini berdasarkan hasil musyawarah gampong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro, melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk melihat bagaimana pengelolaan BUM Gampong Padang Kleng dan Paya Baro dijanjikan. Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan BUMG, berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

4.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang paling penting dalam fungsi manajemen. Dalam membuat sebuah perencanaan perlu mempersiapkan suatu kegiatan secara sistematis dan terencana agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan harapan serta mencapai suatu tujuan. Dalam pengelolaan BUMG diperlukan suatu perencanaan dalam membentuk program-program usaha yang akan dijalankan, maka dalam hal ini pemerintah gampong juga ikut terlibat dalam

proses pembentukan unit-usaha yang yang dijalankan hal dengan pemerintah Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.

Peran pemerintah gampong sangat penting dalam membangun gampong untuk lebih maju baik dari segi pembangunan maupun perekonomian dan pemerintah gampong berhak menyelenggarakan urusan rumah sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini pemerintah gampong perlu menggali potensi yang ada di gampong untuk melihat sumber daya sehingga dapat membantu roda ekonomi masyarakat salah satu program pemerintah adalah membangun lembaga di bidang perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Gampong.

Penyusun rencana BUMG salah tahu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan usaha apa saja yang akan dijalankan guna melihat peluang dan permintaan pasar serta potensi yang ada di gampong sehingga dapat mensukseskan program unit usaha yang dijalankan BUMG kedepannya.

Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam proses penyusunan unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMG Padang Kleng, setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil yang telah disepakati dalam musyawarah gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng menyatakan:

“Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam menentukan unit-unit usaha yang akan dikelola oleh pelaksana operasional salah satu

lembaga yang bergerak dibidang ekonomi BUMG Bina Sejahtera Mandiri dalam musyawarah yang telah disepakati dalam Anggaran Desa (AD) ”⁴⁸

Selanjutnya beliau juga menambahkan mengenai peran beliau sebagai sekretaris gampong dalam pengelolaan BUMG:

“Untuk pengelolaan BUMG saya sebagai sekretaris gampong tidak ikut terlibat dalam memutuskan kebijakan atau dapat dikatakan kurang dalam berpartisipasi dalam musyawarah gampong, yang dimana saat akan melakukan rapat, beliau hanya memberikan sedikit masukan dan saran namun dalam perihal tindakan masih dapat dikatakan kurang ”.⁴⁹

Hal itu juga disampaikan oleh kaur keuangan gampong mengenai peran beliau dalam pengelolaan BUMG yakni sebagai berikut:

“jadi dalam pengelolaan BUMG saya tidak ikut terlibat dalam menentukan usaha-usaha yang akan di buat, namun saya ikut serta dalam pengelolaan BUMG itu ketika pelaporan keuangan yang dilakukan di akhir tahun ”.⁵⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Ketua BUMG Padang Kleng sebagai berikut:

“Penyusunan perencanaan unit usaha yang akan dijalankan di gampong itu kewenangan dari aparaturnya gampong, saya sebagai pengurus hanya menjalankan tugas yang diperintahkan dan untuk jeni-jenis usaha yang saya kelola saat ini ada usaha air isi ulang/ie kleng, mobil desa, teratak dan sound system, dan gedung serba guna ”.⁵¹

⁴⁸ Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd pada tanggal 6 Desember 2021

⁴⁹ Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd pada tanggal 6 Desember 2021

⁵⁰ Wawancara dengan kaur keuangan Gampong Padang Kleng, Rahmat, A.Md, pada tanggal 10 Desember 2021

⁵¹ Wawancara dengan Ketua Bumg Gampong Padang Kleng, Pria Dani, S.Kom, MM, pada tanggal 10 Desember 2021

Kemudian dari hasil wawancara dengan masyarakat gampong sebagai berikut:

“untuk unit usaha BUMG itu kalo tidak salah saya ada usaha air minum sound system teratak, usaha tersebut sudah direncanakan oleh pemerintah gampong dan masyarakat”⁵²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong ikut terlibat dalam penyusunan rencana unit-unit usaha yang akan dikelola BUMG, pemerintah gampong juga memperhatikan usaha apa yang menjadi peluang yang besar untuk mengembangkan usaha yang akan dikelola BUMG. Dan disini sekretaris dan kaur keuangan gampong tidak ikut berperan dalam menentukan unit-unit usaha, namun ketika ada masukan atau pendapat mereka ikut memberikan masukan dan solusi untuk pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan sesuai observasi lapangan peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam menentukan rencana-rencana unit usaha yang akan dijalankan BUMG Bina Sejahtera Mandiri di Gampong Padang Kleng dan pemerintah gampong ikut berpartisipasi dalam memperhatikan potensi dan peluang yang ada di lingkungan Gampong Padang Kleng. Hanya saja pemerintah gampong harus melihat lagi dalam perencanaan unit-unit usaha BUMG Bina Sejahtera Mandiri, karena sebagian dari masyarakat gampong ada yang belum tahu mengenai jenis-jenis usaha dan pemerintah gampong juga perlu melakukan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG,

⁵² Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Agus Jawhir, pada tanggal 5 Januari 2022

kemudian pemerintah juga menjelaskan mengenai BUMG agar masyarakat paham dan ikut terlibat didalamnya.

Pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam perencanaan program unit usaha yang akan dijalankan pengelola operasional BUMG. Dalam penyusunan program unit usaha yang dikelola BUMG Paya Baro dilakukan secara musyawarah bersama aparaturnya gampong dan pendamping gampong untuk membahas unit-unit usaha apa saja yang akan dijalankan serta melihat peluang apa saja yang ada di Gampong Paya Baro mayoritas masyarakat Gampong Paya Baro bekerja sebagai petani, Unit-unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam perempuan, peternakan, perkebunan, dan pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro yakni sebagai berikut

“Untuk pengelolaan unit Badan Usaha Milik Gampong UPGAM yang ada di Gampong Paya Baro merupakan salah satu Lembaga Gampong dimana pemerintah Gampong Paya Baro ikut serta dalam menentukan unit-unit usaha yang di jalakan ketika musyawarah melihat peluang kedepannya untuk membantu perekonomian masyarakat di gampong.”⁵³

Kemudian sekretaris Gampong Paya Baro juga menambahkan bahwa:

“Perencanaan program unit usaha BUMG yang dibentuk di Gampong Paya Baro berdasarkan kesepakatan dari pemerintah gampong. BUMG Gampong Paya Baro sudah sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 pemerintah gampong membuka usaha ternak sapi yang dikelola oleh masyarakat gampong yang miskin. Dalam menentukan penyusunan unit usaha yang akan dibentuk sebagian masyarakat disini kurang yakin karena pada masa pemerintah sebelumnya kurang transparan terhadap pengelolaan BUMG. Pada tahun 2020 kemaren pemerintah ingin

⁵³

Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan, SE, pada tanggal 1 Desember 2021

menambahkan modal untuk usaha BUMG namun modalnya sudah tidak ada karena terpakai untuk BLT.”⁵⁴

Hal itu juga disampaikan oleh masyarakat gampong mengenai BUMG

yakni sebagai berikut:

“untuk unit usaha BUMG ini saya kurang tahu ya, karena saya kurang terlibat dan kurang paham mengenai BUMG, untuk lebih jelas kamu tanyakan kepada sekdes aja”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam proses penyusunan perencanaan unit-unit usaha yang di bentuk dan pemerintah gampong juga memperhatikan peluang usaha apa yang dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli gampong. Kemudian BUMG Paya Baro dari segi perencanaan program unit usaha bisa dikatakan belum maksimal, dan pemerintah gampong juga kurang menyakinkan masyarakat dalam pengelolaan BUMG kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari observasi lapangan menyimpulkan bahwa pemerintah gampong harus lebih terbuka kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha yang sudah dijalankan BUMG, serta pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat gampong sehingga masyarakat dapat mempercayai pemerintah gampong. Walaupun masih memiliki kekurangan tetapi BUMG Paya Baro mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi, dan masih memiliki peluang dengan memanfaatkan potensi yang ada di Gampong Paya Baro.

⁵⁴ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, ST, pada tanggal 2 Desember 2021

⁵⁵ Wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Baro, Nuraidar pada tanggal 5 Januari 2022

4.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan, pelaksanaan dilakukan setelah dilakukan perencanaan, dimana program-program yang telah direncanakan kemudian akan direalisasikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gampong. Dalam pelaksanaan BUMG unit-unit usaha yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah gampong yang akan dijalankan oleh kedua gampong tersebut, pelaksanaan pengelolaan BUMG yang bersumber dari dana desa secara langsung telah dimulai dari perencanaan unit usaha yang tertuang dalam AD/ART BUMG. Pada tahap pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran pengelolaan BUMG dilaksanakan melalui rekening bendahara BUMG serta didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Lembaga BUMG terpisah dengan organisasi pemerintah gampong dalam struktur organisasi BUMG pelaksana operasional BUMG terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris satu orang bendahara, dan kepala unit. Pelaksanaan operasional dipilih berdasarkan musyawarah pemerintah gampong, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa yang lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ketua Pelaksana operasional di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan BUMG, dengan demikian ketua pelaksana mendapatkan nasihat dari pemerintah gampong

untuk disampaikan pada pelaksana lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.⁵⁶

Dalam pelaksanaan BUMG di Gampong Padang Kleng mereka menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini dalam pelaksanaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri perlu menggerakkan unit-unit usaha yang telah direncanakan seperti tratak dan sound system, air RO, mobil desa, dan gedung serba guna. Maka tugas yang dimiliki pelaksana operasional adalah melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus tidak hanya penyertaan modal saja, namun ikut serta dalam pengembangan usaha serta menggerakkan dan mengontrol pelaksanaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri yaitu sebagai berikut:

*“untuk proses pelaksanaan BUMG di Gampong Padang Kleng berdasarkan kepada AD/ART yang sudah ditetapkan, pelaksanaan operasional terdiri dari pembina, pengawas, dan pelaksana”.*⁵⁷

Beliau juga menambahkan bahwa:

“dalam kepengurusan BUMG Bina Sejahtera Mandiri terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan unit-unit usaha. Dalam proses rekrutmen pengurus BUMG dilakukan secara musyawarah. Untuk unit usaha kami hanya melanjutkan usaha dari pengurus sebelumnya yang sudah berjalan”.

⁵⁶ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), Hal 29

⁵⁷ Wawancara dengan Ketua Bumg Gampong Padang Kleng, Pria Dani, S.Kom, MM, pada tanggal 10 Desember 2021

Terkait pemilihan anggota BUMG Bina Sejahtera Mandiri wawancara dengan Bendahara BUMG yaitu:

“pada saat itu proses rekrutmen jadi anggota BUMG kakak hanya di hubungi langsung oleh ketua BUMG melalui telepon beliau menanyakan apakah mau menjadi pengurus BUMG dek?”⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat mengenai pemilihan pengurus BUMG:

“untuk pemilihan pengurus saya kurang tahu, sepertinya untuk pengurus dipilih langsung”⁵⁹

Sesuai dengan uraian informan di atas bahwa dalam proses pemilihan ketua BUMG dilakukan secara musyawarah oleh pemerintah gampong, tapi untuk pemilihan anggotanya ditunjuk langsung oleh ketua BUMG. Kemudian untuk unit usaha sudah ada dari pengurus sebelumnya hanya saja untuk pengurus tahun 2020 melanjutkan unit-unit usaha Bina Sejahtera Mandiri yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya.

Mekanisme pelaksanaan unit usaha Ie Jep/Air isi ulang Bina Sejahtera Mandiri dalam pelaksanaan program ini pemerintah gampong membuat kesepakatan bagi hasil dengan kelompok pengelola BUMG ini dimana pendapatan dalam setiap bulannya 50% untuk gampong yang akan dimasukkan ke dalam kas gampong dan 50% nya lagi untuk pengelola BUMG. Pelaksanaan Ie Jep/Air isi ulang Bina Sejahtera Mandiri sudah berjalan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2016 hingga sekarang. Program ini merupakan salah satu program BUMG yang

⁵⁸ Wawancara dengan Bendahara Bumg Gampong Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

⁵⁹ Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Asmah, pada tanggal 5 Januari 2022

berjalan dengan baik berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUMG terkait pendapatan bulanan program ini:

*“jadi dek untuk usaha Ie Jep sudah berjalan dari 2016, mempunyai 350 galon per galon harga 4000 dan untuk sistem pengeelolaan menggunakan sistem kontrak antara pengelola Ie Jep dengan pengurus BUMG dimana pendapatan 1 bulan dari Ie Jep kita bagi hasil untuk pengelola 50% dan untuk pengurus 50%”.*⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan program usaha Ie Jep sudah berjalan dengan baik, dan sistem pengelolaan usaha ini menggunakan sistem bagi hasil atau sistem kontrak dimana hasil dari usaha Ie Jep ini dibagi dua untuk pengelola 50% dan untuk pengurus 50%, misalnya dalam sebulan pendapatan usaha Ie Jep sebesar Rp 900.000, maka hasilnya dibagi 2 Rp. 450.000, untuk pengelola dan Rp. 450 000, untuk BUMG sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART.

Selain program Ie Jep di Gampong padang kleng juga terdapat beberapa unit usaha lainnya yaitu pengelolaan usaha mobil desa, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUMG sebagai berikut:

“Usaha mobil desa sudah berjalan dari 2018, dengan adanya usaha ini sangat membantu operasional BUMG dalam mengantar dan mengambil usaha Ie Jep dan teratak serta sound system ketika ada acara pesta. Usaha mobil desa bukan untuk usaha Ie Jep aja dek, tetapi juga untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin menyewa. Untuk harga

⁶⁰ Wawancara dengan Bendahara Bumg Gampong Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

penyewaannya itu sekitar Rp 150.000,-200,000 tergantung seberapa jauh pengantarannya.⁶¹

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha mobil desa sudah berjalan dengan baik, dimana unit usaha ini sudah berjalan selama 3 tahun, dengan ada usaha ini sangat membantu unit usaha lain seperti usaha Ie Jep untuk mengantar dan mengambil air galon, hal ini menambah pendapatan untuk usaha mobil desa, selanjutnya mobil desa juga terkadang mengantar tratak apabila ada acara serta menyewakan mobil desa untuk masyarakat gampong yang memiliki usaha dekor. Usaha mobil desa juga sangat membantu masyarakat Gampong Padang Kleng terutama ibu-ibu yasinan ketika mendapat undangan dari luar gampong atau Kecamatan.

Selain itu juga terdapat program penyewaan tratak dan sound system dimana pengelolaan unit di urus oleh 2 orang yang berbeda, satu orang untuk mengelola teratak dan satu orang untuk mengelola sound system. Berdasarkan wawancara dengan bendahara BUMG sebagai berikut:

“Kalo usaha tratak dan sound system sudah ada sejak 2018, usaha ini dikelola oleh dua orang. Usaha tratak ada 4 tenda untuk penyewaan bersihnya masuk kas BUMG Rp 150.000. dan untuk sound system untuk sekali sewa itu kita dapat sekitar Rp 500.000. namun untuk luar gampong Padang Kleng itu kita sewakan sekitar Rp 600.000.”⁶²

Kemudian Ketua BUMG juga menambahkan mengenai pengelolaan tratak dan sound system, sebagai berikut:

⁶¹ Wawancara dengan Bendahara Bumg Gampong Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

⁶² Wawancara dengan Bendahara Bumg Gampong Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

“untuk usaha tratak dan sound system sudah berjalan dengan baik tidak terkendala apapun dan keuangan juga lancar hanya saja pada masa pandemic pendapatannya berkurang karena pemerintah melarang masyarakat untuk menggelar pesta atau kegiatan yang menimbulkan keramaian”.⁶³

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan unit usaha ini sudah berjalan dengan baik dan menambah pendapatan asli gampong serta membantu perekonomian masyarakat, hanya saja pada masa pandemic ini usaha ini tidak berjalan karena ada aturan pemerintah melarang masyarakat untuk menggelar acara semasa pandemic, namun untuk saat ini kondisi COVID yang sudah mulai berkurang serta keadaan pun sudah sudah mulai membaik dan Kabupaten Aceh Jaya bukan merupakan daerah berzona Merah oleh karena itu secara perlahan interaksi sosial masyarakat sudah berjalan seperti biasa namun dengan persyaratan harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Selain dua program yang telah peneliti jelaskan di atas juga terdapat program gedung serba guna, program ini merupakan salah satu usaha milik BUMG Bina Sejahtera mandiri, berdasarkan wawancara dengan bendahara BUMG sebagai berikut:

“Gedung serba guna mulai beroperasi sejak tahun 2020, gedung ini biasanya digunakan ketika ada acara pelatihan, biasanya harga sewanya itu sekitar Rp. 250. 000., untuk sekali pemakaian”.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Ketua BUMG Gampong Padang Kleng, Pria Dani, S.Kom, MM, pada tanggal 10 Desember 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Bendahara BUMG Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

Sesuai uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa unit usaha gedung serba guna merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh pengurus BUMG yang sudah berjalan selama 2 tahun. gedung serba guna ini biasanya disewakan untuk pelatihan-pelatihan dan harga sewanya itu sekitar Rp. 250.000., untuk sekali penyewaan. Dengan adanya usaha ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli gampong.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan sesuai observasi lapangan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri pemerintah gampong juga ikut terlibat dalam proses pemilihan pengurus BUMG di Gampong Padang Kleng. Pelaksanaan setiap unit usaha BUMG di Gampong Padang Kleng sudah berjalan dengan baik sebelum masa pandemic COVID-19 namun terdapat satu unit usaha yang terhambat dan pemasukannya menurun akibat pandemic COVID-19 yaitu unit usaha tratak dan sound sistem sedangkan usaha lainnya seperti ie jep/air isi ulang, mobil desa dan gedung serba guna berjalan dengan baik.

Di Gampong Paya Baro pelaksanaan BUMG sudah berjalan selama 7 tahun dimulai pada tanggal 10 September 2015, pelaksana operasional BUMG di Paya Baro dipilih berdasarkan hasil rapat musyawarah bersama pemerintah gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro sebagai berikut:

*“untuk pemilihan pengurus BUMG dilakukan secara musyawarah gampong”.*⁶⁵

Sesuai pernyataan dari sekretaris gampong peneliti menyimpulkan bahwa pemilihan pengurus BUMG dilakukan secara musyawarah. Namun untuk pengurus BUMG tetap anggota yang lama yaitu mulai dari tahun 2015 hingga sekarang tidak ada pergantian anggota hanya ketua BUMG saja yang diganti karena ketua BUMG yang lama sudah mengundurkan diri, di tahun 2021 ini ketua BUMG yang baru telah terpilih melalui hasil musyawarah, dalam penelitian ini terkait pengelolaan BUMG ketua yang baru terpilih kurang mengetahui informasi terkait pengelolaan BUMG. Hal ini juga di paparkan oleh sekretaris desa dimana:

*“untuk pengelolaan BUMG di tahun 2021 baru saja terpilih ketua yang baru tetapi beliau tidak terlalu paham terkait pengelolaan bumg secara mendalam karena baru saja menjabat, jadi untuk mengetahui informasi lebih dalam bisa di tanyakan kepada saya”.*⁶⁶

Hal ini juga ditambahkan oleh ketua BUMG sebagai berikut:

*“jadi untuk mengetahui mengenai pengelolaan BUMG kamu bisa tanyakan kepada sekdes kalo gak kamu bisa tanyakan lebih jelas kepada bendahara BUMG”*⁶⁷

Hal tersebut juga diperjelas oleh masyarakat gampong sebagai berikut:

*“jadi untuk pemilih pengurus sebelumnya itu dilakukan secara musyawarah namun, untuk pengurus yang baru ini dipilih langsung oleh Keuchik”*⁶⁸

⁶⁵ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, S.T pada tanggal 2 Desember 2021

⁶⁶ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, S.T pada tanggal 2 Desember 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua BUMG Paya Baro, Amiruddin Us, pada tanggal 2 Desember 2021

⁶⁸ Wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Baro, Ina Wati, pada tanggal 5 Januari 2022

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pemilihan operasional BUMG dilakukan secara musyawarah bersama pemerintah gampong, dan berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa ketua BUMG yang baru terpilih belum memahami secara jelas mengenai pengelolaan BUMG yang ada di Gampong Paya Baro sehingga terkait informasi BUMG beliau mengarahkan peneliti untuk menanyakan kepada bendahara BUMG karena sudah lama menjabat sebagai pengurus sekaligus memegang jabatan sebagai bendahara BUMG.

Sedangkan di Gampong Paya Baro terdapat beberapa unit-unit usaha BUMG seperti usaha simpan pinjam, peternakan, kelapa sawit, pohon kelapa, dan pertanian. Unit usaha yang disebutkan sudah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan/pengelolaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong akan peneliti jelaskan mengenai hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMG Usaha Pemakmu Gampong mengenai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan sebagai berikut:

“unit usaha simpan pinjam sudah ada sejak tahun 2010 kemudian usaha ini dilanjutkan pada tahun 2015 sesuai dengan aturan dari pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Gampong, namun usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik. Hal ini karena ada dua dusun pengurus yang ada di Gampong Paya Baro tidak mau memegang lagi unit usaha”.⁶⁹

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan unit usaha simpan pinjam perempuan sudah berjalan dari tahun 2010 kemudian usaha ini

⁶⁹ Wawancara dengan Bendahara BUMG Paya Baro, Mai Suri, pada tanggal 2 Desember 2021

dilanjutkan pada tahun 2015 sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Maka pemerintah gampong mendirikan Badan Usaha Milik Gampong guna gampong lebih mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Unit usaha simpan pinjam perempuan di Gampong Paya Baro belum berjalan dengan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa terdapat 2 dusun yaitu Dusun Cot Trieng dan Dusun Teupin Asan tidak mau mengelola unit usaha simpan pinjam ini karena banyak dari masyarakat gampong yang menunggak bayar iuran perbulannya sehingga menyebabkan uang simpan pinjamnya tidak tau kemana.

Selain itu BUMG Usaha Pemakmu Gampong juga terdapat unit usaha peternakan yaitu sapi, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris gampong sebagai berikut:

*“jadi kita itu ada usaha ternak sapi juga yang sudah berjalan sejak tahun 2017, untuk pembelian sapi pertama berjumlah 6 ekor sapi, untuk proses pengelolaan dilakukan secara sistem pemawah/pelihara oleh masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin”.*⁷⁰

Kemudian Bendahara BUMG juga menambahkan bahwa:

*“sistem pemawah/pelihara sapi ini dilakukan secara bergilir kepada masyarakat gampong, misalnya satu ekor sapi melahirkan 2 anak maka satu diberikan kepada pemawah dan satu lagi untuk BUMG. Dan dengan ada usaha ini sangat membantu masyarakat gampong”*⁷¹

Dari hasil uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan BUMG untuk unit usaha peternakan sapi menggunakan sistem pemawah yang dikelola

⁷⁰ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, ST pada tanggal 2 Desember 2021

⁷¹ Wawancara dengan Bendahara BUMG Paya Baro, Mai Suri, pada tanggal 2 Desember 2021

BUMG Usaha Peumakmu Gampong diberikan kepada masyarakat Gampong Paya Baro yang fikir miskin. Ketika umur sapi sudah satu tahun dan sudah bisa melahirkan maka diberikan kepada pemelihara satu ekor untuk dipelihara sendiri kemudian pengurus BUMG melakukan pergantian pengurus yang baru yaitu masyarakat Gampong Paya Baro yang fakir miskin. Dengan adanya usaha ini sangat membantu masyarakat gampong dalam meningkatkan pendapatan dari segi perekonomian, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya di Gampong Paya Baro terdapat unit usaha perkebunan yaitu kebun kelapa sawit dan pohon kelapa. Dari hasil wawancara dengan keuchik Paya mengenai pelaksanaan usaha kebun sawit sebagai berikut:

*“untuk usaha kebun sawit sudah berjalan sejak tahun 2021, untuk pembelian kebun kelapa sawit saya memberikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000, dengan luasnya sebesar 1,5 Hektare, dengan pendapatan sebulan Rp. 3.000.000, dalam 15 hari panen”.*⁷²

Kemudian ditambahkan oleh sekretaris Paya Baro mengenai usaha kebun sawit sebagai berikut:

*“jadi usaha kelapa sawit dikelola oleh pengurus BUMG sendiri, dan setiap bulannya masuk ke kas Bendahara BUMG”.*⁷³

Dari hasil uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa usaha kebun kelapa sawit sudah berjalan setengah tahun dan dikelola oleh pengurus BUMG Usaha Pemakmu Gampong. Untuk pembelian kebun kelapa sawit anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah gampong sebesar Rp. 80.000.000., dengan luas tanah 1,5 hektar dalam sebulan 2 kali panen. Untuk sekali panen 15 hari dengan

⁷² Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan, SE. pada tanggal 1 Desember 2021

⁷³ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijl ST, pada tanggal 2 Desember 2021

pendapatan Rp. 1.500.000., dalam sebulan dapat sekitar Rp. 3.000.000., setiap kali panen ketua BUMG selalu menyerahkan struk pembayaran kelapa sawit kepada bendahara BUMG. Dengan adanya usaha kelapa sawit ini sangat membantu gampong dari segi pembangunan dan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan untuk usaha pohon kelapa berdasarkan dari hasil wawancara dengan sekretaris Paya Baro menjelaskan bahwa:

*“jadi usaha ini sudah berjalan sejak 2018, dan dikelola oleh pengurus BUMG, anggaran yang diberikan sebesar Rp. 40.000.000. untuk panennya pohon kelapa itu 3 bulan sekali dengan hasil Rp. 500.000 sekali panen”.*⁷⁴

Kemudian keuchik Gampong Paya Baro juga menambahkan mengenai usaha pohon kelapa sebagai berikut:

*“usaha pohon kelapa ini sebenarnya kami beli tanah, kebetulan disitu terdapat 10 pohon kelapa. Karena pada saat pemerintah sebelumnya BUMG ini belum terkelola dengan baik, namun pada saat pemerintahan saat ini baru mulai dibangun.”*⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMG untuk unit usaha pohon kelapa sudah berjalan selama 4 tahun, anggaran yang diberikan pemerintah gampong sebesar Rp. 40.000.000., dengan pendapatan Rp. 500.000., dalam 3 bulan sekali panen.

Selain program yang sudah dijelaskan di atas juga terdapat program atau unit usaha di bidang pertanian yaitu mesin hand traktor dan mesin perontok padi

⁷⁴ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijl ST, pada tanggal 2 Desember 2021

⁷⁵ Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan, SE. pada tanggal 1 Desember 2021

yang dikelola oleh pengurus BUMG Usaha Pemakmu Gampong. Dari hasil wawancara dengan sekretaris gampong mengenai unit usaha pertanian sebagai berikut:

*“jadi usaha mesin perontok ini sudah ada sejak tahun 2016 yang dikelola oleh pengurus BUMG Usaha Peumakmu Gampong, mesin perontok berjumlah 3 buah dan mesin hand traktor ada 1 buah, penggunaan mesin ini dilakukan ketika masyarakat gampong turun kesawah, untuk mesin perontok digunakan ketika masyarakat panen padi dalam 1 tahun ada 2 kali panen.”*⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa pelaksana unit usaha di bidang pertanian sudah ada sejak tahun 2016 yang dikelola oleh pengurus BUMG Usaha Pemakmu Gampong, sistem pelaksanaan unit usaha ini dilakukan pada saat masyarakat turun ke sawah yaitu dalam 1 tahun 2 kali panen, untuk penyewaan sebulan sebesar Rp. 500.000,. dengan adanya usaha ini sangat membantu masyarakat gampong yang bekerja sebagai petani.

Kemudian masyarakat gampong juga menambahkan bahwa:

*“pelaksanaan BUMG di Gampong Paya Baro yang saya tau itu ada simpan pinjam tapi kurang berjalan kemudian sapi yang diberikan kepada masyarakat, untuk sapi ini saya tidak dapat karena saya PNS dan kalo mengenai bantuan-bantuan itu saya tidak dapat jadi saya kurang paham”.*⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menyimpulkan bahwa pelaksanaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong sudah berjalan dengan baik, pemerintah gampong ikut berperan dalam pemilihan pengurus BUMG

⁷⁶ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal. ST. pada tanggal 1 Desember 2021

⁷⁷ Wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Baro Nuraidar, pada tanggal 5 Januari 2022

Usaha Pemakmu Gampong yang dilakukan secara musyawarah dengan aparat gampong, dan dalam pelaksanaan/pengelolaan beberapa unit usaha BUMG di Gampong Paya Baro sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat usaha-usaha yang belum berjalan dengan semestinya yaitu terdapat unit usaha simpan pinjam perempuan belum berjalan dengan baik. Dalam usaha simpan pinjam terdapat 2 dusun di Gampong Paya Baro usaha SPP tidak berjalan bahkan ada satu dusun uangnya sudah tidak ada lagi.

4.1.3 Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan peningkatan pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.⁷⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses tindakan yang dilakukan seorang pemimpin dalam suatu organisasi untuk membina serta membimbing dan mengarahkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik agar tujuan yang telah disusun tercapai dengan baik.

Sedangkan pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan adalah salah satu hal penting untuk mengoptimalka fungsi organisasi dalam mencapai

⁷⁸ Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Hal 207

tujuan organisasi.⁷⁹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk mengawasi seseorang atau beberapa orang ketika melaksanakan tugas agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membuat suatu kerugian dalam suatu organisasi.

Dalam pengelolaan BUMG pemerintahan gampong ikut berperan dalam mengawasi dan membina untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan. Berdasarkan Qanun Gampong Padang Kleng dan Qanun Gampong Paya Baro mengenai Pengelolaan BUMG pemerintah gampong ikut berperan dalam mengawasi dan membina pengelolaan BUMG serta memberikan nasehat bagi pelaksana operasional dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepengurusan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMG dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan pada saat pembentukan.

BUMG Bina Sejahtera Mandiri di Gampong Padang Kleng sudah memiliki badan pengawas yang dibentuk berdasarkan Qanun Gampong Padang Kleng Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), penasehat secara langsung dijabat oleh keuchik Gampong Padang Kleng sedangkan pengawas dan pelaksana operasional ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. Pembentukan yakni untuk mengawasi dan membina seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng. Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik Gampong Padang Kleng sebagai berikut:

⁷⁹ Sukanto, *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5 BPFE*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007). Hal 95

*“tugas saya sebagai keuchik dalam pengelolaan BUMG yaitu mengawasi dan membina dalam setiap kegiatan BUMG di Gampong Padang Kleng”*⁸⁰

sekretaris Gampong Padang Kleng juga menambahkan bahwa:

“jadi pembina dan pengawas BUMG itu dipilih secara langsung, dan untuk binaan/pelatihan itu belum dilakukan, namun pengawas dan pembina ikut bertanggungjawab dalam mengawasi segala kegiatan mengenai pengelolaan BUMG dan di akhir tahun pengurus BUMG melaporkan kegiatan usaha yang telah berjalan. Contohnya untuk unit usaha Ie Jep badan pengawas melakukan pengecekan apakah dibuka atau tidak kegiatan usaha air minum isi ulang. Kegiatan BUMG terus diawasi oleh pengawas untuk melihat sejauh mana pengelolaan BUMG dan apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan usaha serta membantu perekonomian masyarakat”.⁸¹

Kemudian masyarakat juga menambahkan bahwa:

*“Pemerintah gampong ikut terlibat dalam mengawasi dan mengontrol BUMG, karena memang itu tugas mereka, hanya saja untuk diadakan pelatihan bagi pengurus itu belum terlaksana mungkin masih kurang dana apalagi ini kan lagi covid”*⁸²

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembina dan pengawas BUMG dipilih melalui tunjuk langsung, keuchik sebagai komisaris ikut berperan dalam mengawasi dan membina pelaksanaan/pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri, dan dalam setiap kegiatan BUMG Bina Sejahtera Mandiri penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional ikut berkontribusi dalam mengawasi setiap kegiatan unit usaha BUMG seperti melakukan pengecekan terhadap usaha Ie Jep, dan di akhir tahun pengurus BUMG melaporkan setiap kegiatan BUMG.

⁸⁰ Wawancara dengan keuchik Gampong Padang Kleng, Rajudin Walad, pada tanggal 6 Desember 2021

⁸¹ Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd pada tanggal 6 Desember 2021

⁸² Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Agus Juwaih, pada tanggal 5 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menyimpulkan bahwa pemerintah gampong ikut berperan dalam mendirikan merencanakan unit usaha BUMG serta membina dan mengawasi unit usaha dan ikut bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelaksanaan/pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri, guna mendukung dan mensukseskan pelaksana BUMG yang telah direncanakan. Oleh karenanya perlu diawasi oleh badan pengawas dan pembina sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Namun dalam pemilihan pembina/penasehat, pelaksana operasional dan pengawas dilakukan secara tunjuk langsung oleh aparatur gampong bukan dilakukan secara musyawarah dan sesuai dengan Qanun Gampong Padang Kleng tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMG Nomor 28 Tahun 2014 seharusnya ditunjuk langsung oleh masyarakat gampong berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

Sama halnya dengan BUMG Usaha Peumakmu Gampong sudah memiliki badan penasihat dan pengawas yang dibentuk berdasarkan Qanun Gampong Paya Baro Nomor 025 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Paya Baro Tahun Anggaran 2017 – kepengurusan BUMG terdiri dari penasehat keuchik dan Tuha Peut, pelaksana operasional yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro yaitu sebagai berikut:

“ya saya ikut mengawasi dan membina setiap kegiatan dalam usaha BUMG untuk memantau unit usaha sesuai dengan rencana awal yakni mengembangkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.”⁸³

Beliau juga menambahkan bahwa :

Untuk pemilihan badan penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional dilakukan ketika rapat bersama masyarakat dan dipilih langsung secara musyawarah”⁸⁴

Kemudian Bendahara BUMG juga menambahkan bahwa:

“untuk unit usaha BUMG diawasi oleh pemerintah itu diakhir tahun untuk melihat pelaporan keuangannya, dan untuk binaan pun belum ada dilakukan pemerintah gampong”⁸⁵

Masyarakat Gampong Paya Baro juga menambahkan bahwa:

“pemerintah ikut mengawasi setiap kegiatan BUMG, namun untuk dibuat pelatihan dan binaan atau penasehat belum ada, mungkin dananya belum ada”⁸⁶

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa penasihat dan pengawas ikut terlibat dalam mengawasi setiap kegiatan unit usaha BUMG Usaha Pemakmu Gampong untuk memastikan bahwa setiap kegiatan BUMG telah terlaksana sesuai dengan perencanaan awal dengan aturan yang telah ditetapkan. .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menyimpulkan bahwa pemerintah gampong ikut berperan sebagai pendiri dan perencana unit usaha serta membina, mengawasi dan bertanggungjawab dalam setiap kegiatan unit usaha BUMG di lapangan untuk melihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh

⁸³ Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan SE. pada tanggal 1 Desember 2021

⁸⁴ Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan SE. pada tanggal 1 Desember 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Bendahara BUMG, Mai Suri, pada tanggal 2 Desember 2021

⁸⁶ Wawancara dengan masyarakat Gampong Paya Baro Murizal Andriansyah, pada tanggal 5 Desember 2022

pengurus BUMG sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama sehingga dan dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli gampong serta mensejahterakan masyarakat Gampong Paya Baro. Namun untuk binaan terhadap kinerja pengurus, peran pemerintah belum terlihat dan pemerintah Gampong Paya Baro belum melakukan pelatihan secara khusus untuk pengurus BUMG, seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam hal ini untuk dilakukan sosialisasi antara pemerintah gampong dengan masyarakat.

4.2 Kendala dalam Pengelolaan BUMG

Adapun kendala yang dihadapi kedua gampong ini yakni:

Kendala yang di hadapi BUMG di Gampong Padang Kleng berdasarkan wawancara dengan kechik sebagai berikut:

“untuk saat ini kita belum ada kendala dalam pengelolaan BUMG, namun semasa pandemic terdapat salah satu usaha kita pendapatannya menurun”⁸⁷

Hal itu juga diperjelas oleh sekretaris Gampong Padang Kleng sebagai berikut:

“untuk kendala ada di unit usaha tersendiri, yaitu terdapat usaha air isi ulang dan sound system dan lainnya, kendala terbesar itu di samping modal yang terbatas membuat kepengurusan BUMG belum mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain.”⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BUMG sebagai berikut:

“kendala yang dihadapi itu dari segi pemasaran seperti usaha air isi ulang diaman masih banyak orang belum tahu mengenai usaha-usaha yang ada di gampong kita itu”⁸⁹

⁸⁷ Wawancara dengan keuchik Gampong Padang Kleng, Rajudin Walad. pada tanggal 6 Desember 2021

⁸⁸ Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd. pada tanggal 6 Desember 2021

⁸⁹ Wawancara dengan Ketua BUMG Padang Kleng, Pria Rahmadani, S.Kom., MM. pada tanggal 10 Desember 2021

Hal serupa juga disampaikan kaur keuangan Gampong Padang Kleng juga menyampaikan mengenai kendala BUMG sebagai berikut:

“untuk kendalanya itu anggarannya kurang, dan selamanya masa pandemic ini ada beberapa usaha yang kurang berjalan sehingga pemasukan anggaran untuk BUMGpun ikut berkurang”⁹⁰

Kemudian Bendahara BUMG juga menambahkan mengenai kendala yang dihadapi BUMG sebagai berikut:

“jadi gini kendala yg dihadapi BUMG kita ini itu modal nya kurang, sekarang pun lagi COVID-19, jadi ada beberapa usaha kita itu menurun seperti usaha tratak dan sound system dimana pemasukannya itu kurang, karena pada masa pandemic ini tidak boleh diadakan pesta. Dan modal kita juga terbatas tidak mampu bersaing dengan BUMG lain.”⁹¹

Dari uraian di atas peneliti terkait kendala yang dihadapi BUMG Bina Sejahtera Mandiri menyimpulkan bahwa terdapat beberapa unit yang kurang berjalan selama masa pandemic ini, dan hambatan lain yang terutama itu minimnya modal usaha dalam pengembangan usaha BUMG untuk bersaing dengan pengusaha lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ketika melakukan observasi lapangan menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG itu terjadi pada saat pandemic, dimana terdapat unit-unit usaha ini kurang berjalan pada saat pandemic COVID-19 seperti tratak dan sound system, karena aturan pemerintah melarang adanya kerumunan. Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG yakni masih kurangnya pemasaran dan minimnya anggaran untuk modal pengembangan BUMG kedepan, sehingga

⁹⁰ Wawancara dengan kaur keuangan Gampong, Rahmat, A. Md. Pada tanggal 10 Desember 2021

⁹¹ Wawancara dengan Bendahara BUMG Padang Kleng, Rosa Devilza. Pada tanggal 10 Desember 2021

belum bisa bersaing dengan pengusaha lain. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan asli gampong, meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat gampong serta mengurangi pengangguran, pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal permodalan. Dan pemerintah gampong juga diharapkan ikut berperan dalam hal ini untuk pengembangan usaha BUMG Bina Sejahtera Mandiri kedepannya.

Kendala yang dihadapi BUMG di Gampong Paya Baro berdasarkan wawancara dengan keuchik sebagai berikut:

“untuk BUMG gampong kita itu tidak ada kendala sama sekali, pada saat saya saat ini belum ada kendala sama sekali”⁹²

Hal ini diperjelas oleh sekretaris gampong mengenai kendala yang dihadapi BUMG Paya Baro sebagai berikut:

“BUMG gampong kita ini belum berjalan sepenuhnya, tidak seperti BUMG di gampong-gampong lain, tetapi BUMG kita ada hayan saja belum berjalan secara maksima. Dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMG”.⁹³

Bendahara BUMG juga menambahkan sebagai berikut:

“kendala dalam pengelolaan BUMG kurangnya modal untuk membangun usaha baru, terdapat unit usaha yang belum berjalan secara optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMG”⁹⁴

Kemudian sekretaris Gampong Paya Baro juga memperjelas yakni sebagai berikut:

⁹² Wawancara dengan kechik Gampong Paya Baro, Cut Hasan. SE, pada tanggal 1 Desember 2021

⁹³ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, S.T, pada tanggal 2 Desember 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Bendahara BUMG Paya Baro, Mai Suri, pada tanggal 2 Desember 2021

“kemarin tahun 2020 ada rapat dengan masyarakat, pemerintah gampong mau bangun unit usaha untuk BUMG, namun yakin dengan usaha yang akan dibangun karena BUMG periode sebelumnya kurang berjalan karena pemerintah kurang transparan kepada masyarakat. Dan pada tahun kemaren mau buat usaha baru tapi modal sudah tidak ada karena di pakai buat BLT.”⁹⁵

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BUMG Usaha Pemakmu Gampong yaitu masih terdapat unit usaha yang berjalan secara optimal, kurangnya modal usaha untuk membangun unit usaha baru karena dananya sudah terpakai untuk BLT. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMG, hal ini dikarenakan pemerintah gampong kurang terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ketika melakukan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong ini terjadinya miskomunikasi dalam ruang lingkup pemerintah gampong, mengenai apa saja kendala yang dihadapi BUMG. Kemudian kendala lain yaitu kurangnya modal dalam membangun usaha baru dan pemerintah gampong kurang terbuka terhadap masyarakat sehingga membuat mereka kurang ikut terlibat dalam setiap kegiatan BUMG. Oleh karena itu pemerintah gampong harus lebih berperan dalam pengelolaan BUMG untuk membangun usaha baru pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pengembangan BUMG kedepannya serta membantu masyarakat gampong dari segi membuka

⁹⁵ Wawancara dengan sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, S.T., pada tanggal 2 Desember 2021

lapangan pekerjaan. Dan pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah gampong juga harus lebih terbuka kepada masyarakat.

4.3 Studi Komparatif Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan BUMG

Tabel 4.1
Perbandingan Peran Pemerintahan Gampong dalam BUMG di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro

NO.	Keterangan	Gampong Padang Kleng	Gampong Paya baro
1.	Perencanaan	Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam penyusunan rencana unit-unit usaha yang akan dijalankan BUMG Bina Sejahtera Mandiri dan pemerintah gampong ikut memperhatikan peluang dan potensi yang ada dilingkungan gampong. Namun peran pemerintah dalam pengelolaan BUMG masih kurang dimana masih ada masyarakat gampong masih belum paham mengenai BUMG, dan unit-	Pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam penyusunan rencana unit-unit usaha yang akan dijalankan BUMG Usaha Pemakmu Gampong. pemerintah gampong ikut memperhatikan peluang dan potensi yang ada dilingkungan gampong. Peran pemerintah gampong belum bisa dikatakan baik karena kurangnya kepercayaan masyarakat

		<p>unit usaha apa saja yang ada di BUMG mereka tidak tahu. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMG.</p>	<p>gampong serta pemerintah gampong kurang transparan mengenai pengelolaan BUMG.</p>
2.	Pelaksanaan	<p>Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam pelaksanaan usaha BUMG Bina Sejahtera Mandiri, keterlibatan pemerintah gampong juga terlihat dari mulai pemilihan pengurus BUMG dan pelaksanaan unit-unit usaha yang telah berjalan dengan baik. Hanya saja untuk pemilihan pengurus BUMG dilakukan secara tunjuk langsung tidak musyawarah. Selama masa</p>	<p>Pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam pelaksanaan usaha BUMG Usaha Pemakmu Gampong, pemerintah gampong juga ikut terlibat dalam proses pemilihan pengurus BUMG, dan dilakukan secara musyawarah, hanya saja pada saat pemilihan ketua BUMG yang baru, ditunjuk langsung oleh keuchik. Kemudian</p>

		<p>pandemic COVID-19</p> <p>terdapat unit usaha yang kurang berjalan yaitu usaha teratak dan sound system. Sedangkan untuk usaha lain berjalan dengan semestinya.</p>	<p>pelaksanaan BUMG</p> <p>Usaha Pemakmu Gampong sudah berjalan dengan baik. Namun dalam usaha ini terdapat 1 unit usaha yang belum berjalan dengan maksimal yakni usaha simpan pinjam perempuan dimana terdapat 2 dusun Gampong Paya Baro sudah tidak berjalan lagi, bahkan ada 1 dusun uang SPP sudah tidak ada lagi uang.</p>
3.	<p>Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam membina dan mengawasi unit usaha dan ikut bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelaksanaan/pengelolaan</p>	<p>Pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam mendirikan dan merencanakan unit usaha BUMG serta membina, mengawasi dan bertanggung jawab</p>

		<p>BUMG Bina Sejahtera Mandiri, guna mendukung dan mensukseskan pelaksana BUMG yang telah direncanakan ketika musyawarah gampong. Dalam pemilihan pembina/penasehat, pelaksana operasional dan pengawas dilakukan secara tunjuk langsung oleh aparatur gampong bukan dilakukan secara musyawarah sesuai dengan Qanun Gampong Padang Kleng Tentang Pembentukan Pengelolaan BUMG Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha BUMG dilakukan ketika akhir tahun. Pemerintah gampong belum</p>	<p>dalam setiap kegiatan unit usaha BUMG sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama dan dapat membantu perekonomian masyarakat Gampong Paya Baro. Namun untuk pembina/penasehat terhadap kinerja pengurus, peran pemerintah belum terlihat dan pemerintah gampong belum melakukan pelatihan secara khusus untuk pengurus BUMG.</p>
--	--	--	---

		<p>sepenuhnya berperan dalam pengelolaan BUMG dimana masih ada sebagian dari masyarakat gampong masih belum tahu mengenai BUMG, dan pemerintah gampong juga perlu melakukan pelatihan khusus kepada pengurus BUMG.</p>	
--	--	--	--

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah gampong sudah berperan dalam pengelolaan BUMG di kedua gampong tersebut. Namun dalam pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng terdapat unit usaha yang pendapatannya menurun semenjak pandemic COVID-19 dan ada sebagian dari masyarakat kurang mengetahui mengenai BUMG. Sedangkan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Paya Baro terdapat unit usaha yang kurang berjalan yakni usaha SPP, dan pemerintah Gampong Paya Baro juga kurang transparan kepada masyarakat mengenai BUMG.

Berdasarkan perbandingan diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah Gampong Padang Kleng sudah lebih baik dibandingkan dengan Gampong Paya Baro. Adapun dalam pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng sudah berjalan lebih baik dilihat dari sisi pendapatan dan sisi pengelolaannya. Sedangkan di Gampong Paya Baro terdapat unit usaha yang

kurang berjalan dengan baik yaitu unit usaha SPP. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng sudah lebih baik dari pada Gampong Paya Baro

4.4 Sistem Pengelolaan Keuangan

Badan Usaha Milik Gampong merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh pemerintah gampong untuk membantu meningkatkan pendapatan asli gampong dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta mensejahterakan masyarakat.

Dalam pengelolaan BUMG terdapat pengelolaan keuangan BUMG yang dikelola oleh bendahara untuk melaporkan keuangan BUMG kepada pemerintah gampong. Laporan keuangan merupakan suatu informasi mengenai transaksi yang dilakukan dalam kegiatan BUMG.

Di Gampong Padang Kleng pemerintah memberikan anggaran untuk pengelolaan BUMG tahun 2020 sebesar Rp. 30.000.000., berdasarkan wawancara dengan sekretaris gampong sebagai berikut:

*“pengelolaan keuangan BUMG memberikan langsung anggaran tersebut kepada pengurus BUMG anggaran yang diberikan pemerintah gampong itu sebesar Rp. 30.000.000., usaha BUMG ini juga sudah mendapatkan kembali modalanya dan disumbangkan kepada menasah gampong yang sedang proses pembangunan”*⁹⁶

Hal itu juga diperkuat oleh Bendahara BUMG:

“pemerintah gampong memberikan anggaran kepada BUMG itu sebesar Rp. 30.000.000., anggaran yang diberikan pemerintah gampong kepada pengurus, anggaran yang diberikan kami gunakan untuk keperluan usaha-

⁹⁶ Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd pada tanggal 6 Desember 2021

*usaha BUMG seperti kerusakan galon, perbaikan mobil, beli tenda baru dan untuk keperluan BUMG lainnya”.*⁹⁷

Kemudian juga ditambahkan oleh kaur keuangan gampong yaitu sebagai berikut:

*“Untuk laporang keuangan BUMG saya tidak ikut campur karena itu diluar organisasi gampong namun pengurus BUMG melaporkan laporan keuangan BUMG di akhir tahun oleh pengurus BUMG, nanti disitu dijelaskan semua mengenai kegiatan BUMG berapa keuntungan yang didapatkan dan berapa kerugian yang dihasilkan.”*⁹⁸



⁹⁷ Wawancara dengan Bendahara BUMG Padang Kleng, Rosa Devilza, pada tanggal 10 Desember 2021

⁹⁸ Wawancara dengan kaur keuangan Gampong Padang Kleng, Rahmat, A.Md pada tanggal 10 Desember 2021

LAPORAN LABA RUGI
KEUANGAN BUMG BINA SEJAHTERA MANDIRI
GAMPONG PADANG KLENG KECAMATAN TEUNOM
TAHUN ANGGARAN 2020

PENJUALAN	
AMDK Ie Kleng	Rp 1,700,000
Hasil Sewa Sound Sytem	Rp 2,200,000
Sewa Mobil	Rp 350,000
Sewa Tenda	Rp 150,000
Penjualan Masker	Rp 200,000
Daging	Rp 125,000
Total Penjualan	Rp 4,725,000
Pot Penjualan	Rp 1,000,000
Penjualan Bersih	Rp 3,725,000
BEBAN USAHA	
Service Mobil	Rp 2,695,000
AMDK Ie Kleng	Rp 2,125,000
Beban ATK	Rp 65,000
Beban Pembelian Daging Meugang	Rp 970,000
Beban Pembelian Kartu Perdana Telkomsel	Rp 20,000
Konsumsi Staf BUMG	Rp 330,000
Jumlah Beban Usaha	Rp 6,205,000
JUMLAH LABA/RUGI	Rp -2,480,000

Gambar 4.1 Laporan Keuangan BUMG Gampong Padang Kleng

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah gampong memberikan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.000.000., kepada pengurus BUMG untuk mengelola kegiatan usaha apa saja yang diperlukan untuk unit usaha BUMG. Dan bendahara BUMG juga melaporkan

setiap pengeluaran dalam kegiatan BUMG laporan keuangan tersebut diserahkan kepada pemerintah gampong ketika di akhir tahun untuk dilakukan pengawasan oleh pemerintah mengenai laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Gampong Padang Kleng berperan dalam pengelolaan laporan keuangan BUMG dan pemerintah gampong juga memberikan anggaran untuk unit usaha BUMG di tahun 2020 sebesar Rp. 30.000.000., pemerintah gampong ikut serta mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan BUMG di akhir tahun.

Di Gampong Paya Baro Pemerintah memberikan anggaran untuk tahun 2020 itu sebesar Rp. 80 000.000., berdasarkan wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro sebagai berikut:

“Anggaran yang saya berikan kepada BUMG itu sebesar Rp. 80.000.000., dan uangnya itu dipakai untuk beli kebun sawit seluas 1.5 hektar, dan untuk pengelolaan laporan keuangan akan diawasi di akhir tahun”⁹⁹

Kemudian bendahara BUMG Paya Baro juga menambahkan bahwa :

“Pada tahun 2020 pemerintah gampong ada buat proposal untuk membeli kebun sawit dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000., dan itu terealisasikan dengan adanya kebun sawit seluas 1,5 hektar. Kemudian untuk laporan mengenai kebun sawit saya yang kelola, setiap panen sawit bon/struknya selalu diserahkan ke saya dan dicatat dalam buku, di buku tersebut semua ada mulai dari penjualan sapi, beli sapi dan pemasukan laporan keuangan BUMG semua ada, dan di akhir tahun kami pengurus

⁹⁹ Wawancara dengan keuchik Gampong Paya Baro, Cut Hasan. SE, pada tanggal 1 Desember 2021

BUMG melaporkan setiap kegiatan mengenai laporan keuangan BUMG
„100

Kaur keuangan Gampong Paya Baro juga menyampaikan bahwa:

“mengenai laporan keuangan BUMG saya tidak ikut terlibat karena BUMG merupakan lembaga diluar organisasi pemerintah gampong dan mempunyai struktur organisasi sendiri di dalamnya terdiri dari bendahara, tapi untuk laporan pengelolaan keuangan BUMG biasanya dilakukan di akhir tahun”¹⁰¹

Dari penjelasan diastase peneliti menyimpulkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah gampong sebesar Rp. 80.000.000., digunakan semua untuk membeli kebun sawit seluas 1.5 hektar. Laporan keuangan mengenai kegiatan usaha BUMG juga semua dicatat oleh bendahara BUMG baik itu pengeluaran maupun pemasukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan sesuai dengan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Gampong Paya Baro sangat berperan dalam memberikan bantuan modal dalam usaha BUMG untuk memajukan usaha. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pemerintah gampong ikut terlibat dalam mengawasi laporan keuangan BUMG dan ini dilakukan di akhir tahun ketika pembukuan.

Berdasarkan perbandingan dari kedua gampong diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan di Gampong Padang kleng sudah lebih baik di bandingkan dengan Gampong Paya Baro, dikarenakan di Gampong Padang Kleng membuat laporan keuangan secara rutin setiap tahunnya sedangkan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bendahara BUMG Paya Baro, Mai Suri , pada tanggal 2 Desember 2021

¹⁰¹ Wawancara dengan kaur keuangan Gampong Paya Baro, Mahfud, SE, pada tanggal 6 Desember 2021

di Gampong Paya Baro tidak di buat laporan keuangan tahunan hanya saja di tulis dalam buku catatan manual yang mencatat tentang uang yang masuk dan uang yang keluar di setiap bulannya.





BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Padang Kleng ikut berperan dalam pengelolaan BUMG yaitu baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pembinaan. BUMG di Gampong Padang Kleng belum bisa dikatakan sepenuhnya sempurna jika dilihat dari segi usaha-usaha yang dijalankan, dan juga masih terdapat kendala dalam menjalankan salah satu unit usaha selama masa pandemic COVID-19. Pemerintah gampong harus melakukan pelatihan kepada pengurus BUMG serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat gampong mengenai usaha BUMG. Sedangkan pemerintah Gampong Paya Baro ikut berperan dalam pengelolaan BUMG yaitu baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan BUMG di gampong Paya Baro belum sepenuhnya berjalan optimal, dimana terdapat usaha yang dapat dikatakan kurang berjalan dan kurang terbukanya pemerintah kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat kurang percaya. Adapun terkait pelaporan keuangan dimana di Gampong Padang kleng sudah lebih baik di bandingkan dengan Gampong Paya Baro, dikarenakan di Gampong Padang Kleng membuat laporan keuangan secara rutin setiap

tahunnya sedangkan di Gampong Paya Baro tidak di buat laporan keuangan tahunan hanya saja di tulis dalam buku catatan manual yang mencatat tentang uang yang masuk dan uang yang keluar di setiap bulannya.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Padang Kleng dalam pengelolaan BUMG yaitu pada saat pandemic, dimana terdapat unit usaha yang pendapatannya berkurang. Kendala lain yang dihadapi masih kurangnya pemasaran dan minimnya anggaran, sehingga belum bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain.

Kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Paya Baro dalam pengelolaan BUMG yaitu kurangnya modal usaha untuk membangun usaha baru karena dananya sudah terpakai untuk keperluan lain. Maka pemerintah gampong perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian kendala lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMG.

5.2. Saran

Pemerintah sebagai fasilitator harus memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang BUMG dengan narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya guna meningkatkan keterampilan dan menciptakan inovasi baru dalam mengembangkan BUMG. Kemudian pemerintah juga harus terbuka kepada masyarakat mengenai semua urusan yang berkaitan dengan perkembangan gampong kedepannya. Dan pemerintah juga perlu melakukan

sosialisasi kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam unit usaha BUMG.



DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Rujukan Buku

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Burhanuddin dan Imron, Ali. *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003)
- Diana, Irine Sari Wijayanti. *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008)
- Juliatriza, Djati dan John Soeprihanto, *manajemen umum sebuah pengantar dan masalah* (Yogyakarta: BPF, 1998)
- Herdiansyah. Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika. 2010)
- Husaini. Usman. *Manajemen Teori, Praktik dan riset Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006)
- J, Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi Penelitian dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)
- Kamaroesid. Herry. *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016).
- Moleong, Laxy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Norwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007)
- Nasution. Muslimin. *Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agroindustri*. (Bogor: IPB Press. 2002)
- Pasolong, Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2016).
- R. Terry, George. *Dasar-dasar Manajemen*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Rahardjo. Adisasmita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011)
- Siagian Sondang, *Fungsi-fungsi manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2012)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-19, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008).
- Soekanto. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa Sosiologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013)
- Soerjono. Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta. Rajawali Pers. 2013)
- Syaiful, Anwar. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Rosdakarya. 2011)
- Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008)
- Wulansari. Dewi. *“Sosiologi Konsep dan Teori*. (Bandung: Refika Aditama. 2009)

B. Daftar Rujukan E-Jurnal

- Dasmi Husin, Hilmi,dkk, *Pendampingan Manajerial Pengelolaan BUMG Sepakat Jaya di Blang Mangat Kota Lhokseumawe*, Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe, Vol 4 No. 1 April 2020
- Zuhrizal Fadhly, Ramayana, *Peran Pemerintah Gampong dalam Mengoptimalkan Program Posyandu*, Jurnal Public Policy UTU, Vol.4, No.2, Oktober 2018
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari “*Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”.(2016) , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol.5 No. 2

C. Daftar Rujukan Skripsi

- Dina Asmatul Asna, (2019), “*Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Komparatif di Desa Kedung Suren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)*”. Skripsi, Universitas Walisongo Semarang.
- Fifianti, (2018), “*Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar)*”.Skripsi ,Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rumaini, (2019), “*Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

D. Daftar Rujukan Media Online

- <http://Dpmg.acehprov.go.id>
<https://kbbi.web.id>

E. Daftar Rujukan Perundang-undangan.

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong.

F. Daftar Wawancara Dengan Informan

- Wawancara dengan keuchik Gampong Padang Kleng, Rajudin Walad
- Wawancara dengan sekretaris Gampong Padang Kleng, Rizal Masdi, S.Pd
- Wawancara dengan kaur keuangan Gampong Padang kleng, Rahmad, A.md

Wawancara dengan Ketua BUMG Padang Kleng, Pria Rahmadhani, S. Kom.,MM

Wawancara dengan Bendahara BUMG Padanng Kleng, Rosa Delviza

Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Agus Juwaihir

Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Sawiyah

Wawancara dengan masyarakat Gampong Padang Kleng, Asmah

Wawancara dengan Kechik Gampong Paya Baro, Cut Hasan. SE.

Wawancara dengan Sekretaris Gampong Paya Baro, Ades Rijal, S.T

Wawancara dengan Kur Kuangan Gampong Paya Baro, Mahfud, S.E

Wawancara dengan Ketua BUMG Paya Baro, Amiruddin. US

Wawancara dengan Bendahara BUMG Paya Baro, Mai Suri

Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Baro, Murizal Andriyansyah

Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paya Baro, Inawati



DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Nama : Okta Listia

Nim : 170802092

Judul Skripsi : Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Komparatif Di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro)

Informan : Kepala desa/keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur Bendahara Gampong, Ketua BUMG, Anggota BUMG. Dan Masyarakat Gampong

Fokus : Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan BUMG

A. Kepala Desa/Keuchik

1. Bagaimana Sejarah berdirinya BUMG?
2. Apa tujuan dari berdirinya BUMG?
3. Apakah keuchik berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha BUMG?
4. Apa saja program BUMG di kampong ini, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik?
5. Apakah keuchik berperan dalam membina, menasihati, serta mengawasi operasional BUMG?
6. Apa saja kendala dalam yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG, dan solusi apa yang diberikan?
7. Sejauh mana keterlibatan keuchik dalam pengelolaan BUMG dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
8. Apa saja bentuk dukungan keuchik dalam proses perkembangan BUMG?

B. Sekretaris Gampong

1. Apa peran sekretaris gampong dalam pengelolaan BUMG?
2. Bagaimana proses pembentukan BUMG?
3. Menurut bapak pengelolaan BUMG di gampong ini sudah berjalan dengan baik?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan BUMG?

C. Kaur Bendahara Gampong

1. Apa peran kaur keuangan dalam pengelolaan BUMG?
2. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan BUMG?
3. Berapa anggaran yang diberikan untuk pengelolaan BUMG?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan BUMG?
5. Menurut bapak pengelolaan BUMG di gampong ini sudah baik?

D. Ketua BUMG

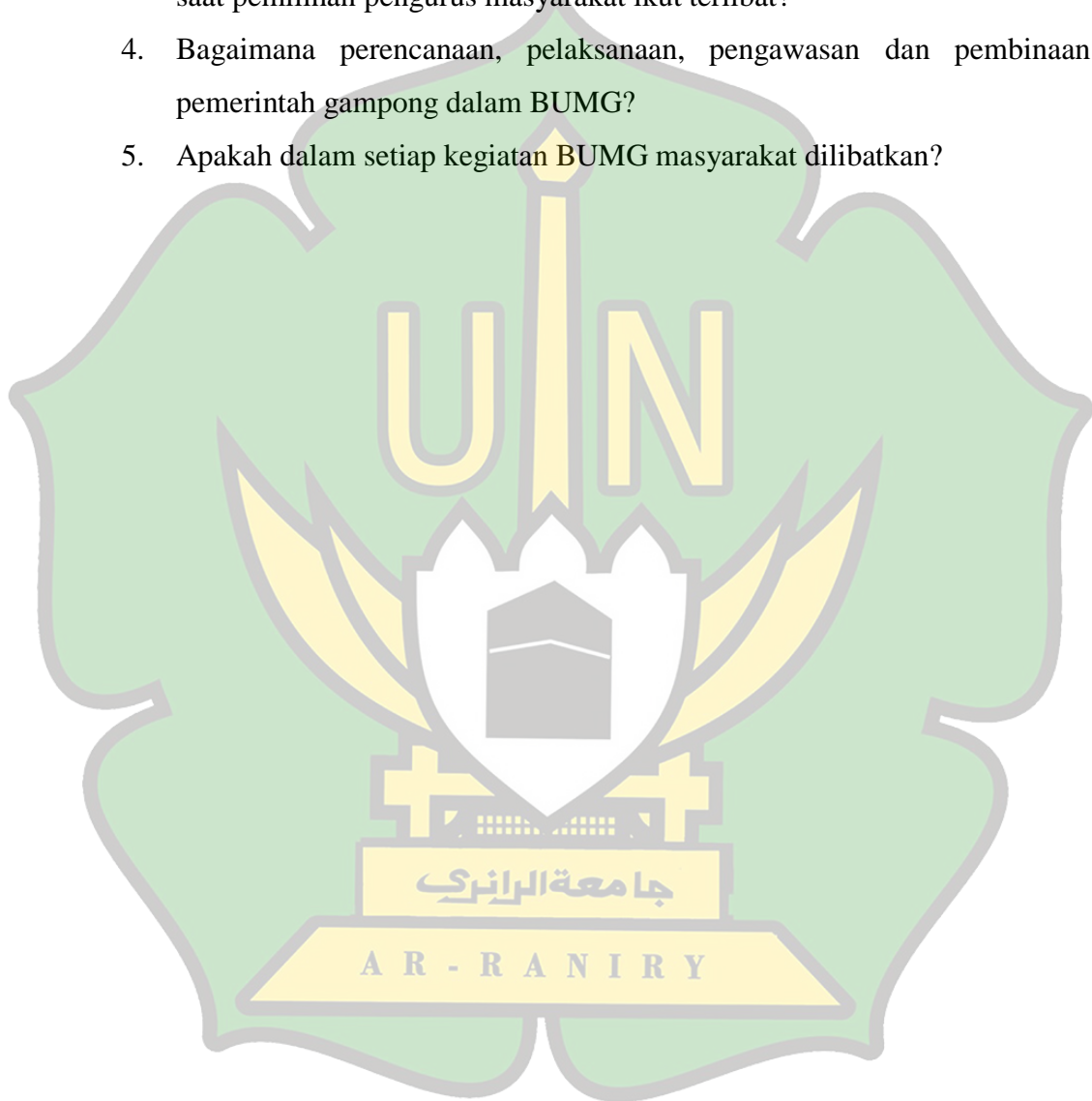
1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMG?
2. Apa tujuan dari berdirinya BUMG?
3. Apakah ketua berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha BUMG?
4. Apa saja program BUMG di gampong ini?
5. Apakah program tersebut sudah terlaksana dengan baik? apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?
6. Apa tugas anda sebagai ketua BUMG?
7. Bagaimana peran ketua dalam membina, serta mengawasi operasional BUMG?
8. Apa saja kendala dalam yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG, dan solusi apa yang diberikan?
9. Bagaimana peran ketua dalam mengawasi pengelolaan BUMG?
10. Apa saja bentuk dukungan ketua dalam proses perkembangan BUMG?

E. Anggota BUMG

1. Bagaimana anda direkrut sebagai anggota BUMG?
2. Apa peran anda sebagai anggota BUMG?
3. Apa saja program BUMG di gampong ini?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMG?
5. Apakah program tersebut sudah terlaksana dengan baik? apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?
6. Apakah program BUMG dapat meningkatkan pendapatan anggota?

F. Masyarakat

1. Apa pemerintah gampong ikut berperan dalam pengelolaan BUMG?
2. Apa saja jenis usaha BUMG di gampong?
3. Apakah ibu/bapak ikut terlibat dalam pembentukan BUMG? Dan pada saat pemilihan pengurus masyarakat ikut terlibat?
4. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan pemerintah gampong dalam BUMG?
5. Apakah dalam setiap kegiatan BUMG masyarakat dilibatkan?



1.2 Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 972/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2021

TENTANG

**PENGGAKTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk Saudara

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Okta Liatla


NIM : 170802092

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan BUMG (Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 16 April 2021
 An. Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk disakun dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan

1.3 Surat Izin Penelitian

Document https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2520/Un.08/FISIPI/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
1. Gampong Padang Kleng 2. Gampong Paya Baro


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **OKTA LISTIA / 170802092**
Semester/Jurusan : **X / Ilmu Administrasi Negara**
Alamat sekarang : **Kajhu**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif Di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 16 Mei 2022



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

1 of 1 12/19/2021, 8:24 PM

1.4 Surat Sudah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN TEUNOM
KEUCHIK GAMPONG PADANG KLENG
Jalan Banda Aceh - Meulaboh Km 189 Kode Pos 23653
PADANG KLENG

Padang Kleng, 13 Desember 2021

<p>Nomor : 145/3./2./2003/2021 Lampiran : - Perihal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian</p>	<p>Kepada Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry di, Banda Aceh</p>
--	--

1. Sehubungan dengan surat nomor : B-2520/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/11/2021 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan perihal pengantar penelitian dan biodata mahasiswi sebagai berikut.

Nama : **OKTA LISTA**
 NIM : 170802092
 Jurusan : Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Judul : Peran Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Kompratif Di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro.
2. Maka dengan ini kami selaku Keuchik Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya memberikan izin untuk melakukan penelitian kegiatan tersebut.
3. Demikian Surat ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Kleng, 13 Desember 2021
Keuchik Gampong Padang Kleng


RAJUDIN WALAD

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN TEUNOM
KEUCHIK GAMPONG PAYA BARO
Jalan Banda Aceh – Meulaboh No..KM 194
PAYA BARO**

Kode Pos 23651

Nomor : 430/2019/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian

Paya Baro, 04 Desember 2021
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

1 Sehubungan dengan surat nomor B-2520/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2021 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan perihal pengantar penelitian dengan biodata Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : OKTA LISTIA
NIM : 170802092
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Paya Baro

- 2 Maka dengan ini kami selaku Keuchik Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Memberi izin untuk melakukan penelitian kegiatan tersebut.
- 3 Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui
Keuchik Gampong Paya Baro

AR - RANIRY
HASAN, SE

1.5 Dokumentasi Saat Penelitian

Lampiran Foto Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi bersama Keuchik Gampong Padang Kleng



Dokumentasi bersama Sekretaris Gampong Padang KLeng



Dokumentasi bersama Kaur Keuangan Gampong Padang Kleng



Dokumentasi bersama Ketua BUMG Bina Sejahtera Mandiri



Dokumentasi bersama Bendahara BUMG Bina Sejahtera Mandiri



Dokumentasi Bersama Keuchik Gampong Paya Baro



Dokumentasi bersama Sekretaris Gampong Paya Baro



Dokumentasi bersama Kaur Keuangan Gampong Paya Baro



Dokumentasi bersama Bendahara BUMG Paya Baro



Dokumentasi dengan masyarakat Gampong.Padang Kleng



AR - RANIRY
Dokumentasi dengan Masyarakat Gampong Paya Baro



Unit usaha BUMG Bina Sejahtera Mandiri

1. Unit Usaha Ie Jep/Air Minum Isi Ulang



2. Unit Usaha Teratak dan Sound System



3. Unit Usaha Mobil Desa



4. Usaha Gedung Serba Guna



Unit Usaha BUMG Usaha Pemakmu Gampong

1. Unit Usaha Simpan Pinjam Perempuan



No	Nama Anggota	Alamat	Tempat Kerja	Agama	Umur	Menikah	Pendidikan	Keanggotaan	Tabung	Pinjaman	Saldo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. Unit Usaha Perternakan Sapi



3. Unit Usaha Perkebunan



4. Unit Usaha Pertanian

